

Pendidikan karakter memiliki cakupan yang amat kompleks. Tidak hanya pendidikan agama dan pendidikan moral, pendidikan karakter memiliki banyak varian yang dilahirkan dari pemaknaan terhadap karakter manusia. Pendidikan karakter perlu didalami dalam dinamika sejarah dan lintasan wilayah secara komprehensif. Untuk membantu pemahaman dalam pendidikan karakter inilah, buku ini disusun. "Bahan Ajar mata kuliah Pendidikan Karakter Berbasis Nasionalisme". Buku ini diharap mampu menjadi bahan panduan bagi mahasiswa untuk mengkaji dan memahami persoalan krisis karakter yang telah lama menghinggapi dalam diri Bangsa Indonesia. Selain untuk mahasiswa, buku ini juga dapat dimanfaatkan para dosen dan pemerhati pendidikan karakter. Buku ini memiliki Keterbaruan sebagai hasil dari penelitian hibah Dikti, dalam mengembangkan nation character building di Indonesia. Melalui buku ini, para pembaca akan disajikan terkait konsep pembangunan, pendidikan karakter serta bagaimana pengaruh pembangunan karakter terhadap kemajuan bangsa dan Negara.

Redaksi:

Jalan Sumpah Pemuda No 18. Joglo, Banjarsari,
Kota Surakarta
unisripres@gmail.com



PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME

Penulis:

Dr. Anita Trisiana,SPd,MH
Dr. Sugiaryo,SH.M.Pd.,MH.
Dr. Rispanyo,MSi.

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME

Oleh:

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.

Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.

Dr. Rispanyo, M.Si.

Penerbit



Unisri Press © 2020

PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME

Penulis:

Dr. Anita Trisiana, S.Pd., M.H.

Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.

Dr. Rispantyo, M.Si.

ISBN : 978-623-93591-5-7

Penyunting:

Hasna Wijayati

Desain sampul dan tata letak:

Rusdianto

Penerbit:

UNISRI Press

Jalan Sumpah Pemuda No 18, Joglo, Banjarsari,

Kota Surakarta

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Dicetak oleh Percetakan Kurnia Solo

Cetakan Pertama, Mei 2020

Copyright © 2020

ISI MENJADI TANGGUNG JAWAB PENULIS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang, dilarang
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin
tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bahan Ajar mata kuliah Pendidikan Karakter Berbasis Nasionalisme ini dimaksudkan sebagai bahan panduan bagi mahasiswa untuk mengkaji dan memahami Persoalan krisis karakter yang telah lama menghinggapi dalam diri bangsa Indonesia, konsep pembangunan, pendidikan karakter serta bagaimana pengaruh pembangunan karakter terhadap kemajuan bangsa dan Negara.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak, sehingga Bahan Ajar ini dapat selesai. Penulis masih terus mengharapkan kritik dan saran demi sempurnanya penyusunan Bahan Ajar ini dimasa mendatang.

Semoga Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah Pendidikan Karakter dan khalayak umum. Selamat belajar, dan semoga sukses.

Surakarta, April 2020

Penulis

KATA SAMBUTAN

Bahan Ajar Mata Kuliah Pendidikan Karakter Berbasis Nasionalisme Semester II Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dengan Penulis :

Dr. Anita Trisiana,SPd,MH
Dr. Sugiaryo,SH.M.Pd.,MH.
Dr. Rispanyo,MSi.

Setelah diperiksa telah memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah (khususnya penulisan Bahan Ajar) dan dapat disyahkan sebagai pegangan dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Karakter.

Surakarta, April 2020

Dekan FKIP

Dra. Sri Hartini, M.Pd.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	<i>iii</i>
KATA SAMBUTAN.....	<i>iv</i>
Daftar Isi.....	<i>v</i>
BAB I SELAYANG PANDANG TENTANG KARAKTER.....	1
A. Konsep Karakter.....	1
B. Sejarah Pendidikan Karakter.....	7
1) Pendidikan Karakter Yunani Kuno.....	7
2) Pendidikan Karakter Romawi dan Abad Pertengahan.....	20
3) Pendidikan Karakter Era Modern.....	24
4) Pendidikan Karakter di Indonesia.....	37
BAB II KONSEP DASAR PENDIDIKAN KARAKTER.....	41
A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Karakter.....	41
B. Dasar Hukum Pendidikan Karakter.....	44
BAB III MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME.....	46
A. Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi.....	46
B. Pendidikan Karakter Berbasis Nasionalisme.....	73
1) Hakikat Nasionalisme.....	73
2) Hakikat Patriotisme.....	77
3) Kesetiakawanan Sosial.....	80

BAB IV NILAI MORAL DALAM PENDIDIKAN KARAKTER....	86
A. Pengertian Nilai.....	86
B. Unsur – unsur Nilai.....	87
C. Pendekatan Penanaman Nilai.....	91
D. Pendekatan Klarifikasi Nilai.....	95
E. Konsep Moral.....	104
F. Perkembangan Penalaran Moral.....	107
G. Nilai Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan	108
H. Tahapan Perkembangan Moral.....	113
I. Nilai Moral sebagai Pilar Pendidikan Karakter.....	119
BAB V PILAR PENDIDIKAN KARAKTER.....	132
A. Konsep Habitulasi dan Intervensi.....	132
B. Hubungan Nilai dengan Pilar Pendidikan Karakter.....	136
BAB VI STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER.....	145
KISI – KISI EVALUASI PENDIDIKAN KARAKTER.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	159
SINOPSIS PENULIS.....	164

BAB I

SELAYANG PANDANG TENTANG

KARAKTER

A. Konsep Karakter

Karakter secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *`karasso`* yang berarti cetak biru, format dasar, sidik seperti sidik jari (Koesoema 2010:90). Menurut Rutland (2009:1), karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti dipahat. Karakter merupakan kumpulan atau gabungan dari kebajikan dan nilai-nilai yang dipahat di dalam batu hidup tersebut, akan menyatakan nilai yang sebenarnya. Senada dengan Rutland, Munir (2010:2) menyatakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein*, yang berarti mengukir. Dalam pemakaian berbahasa, karakter disinonimkan dengan tabiat, watak, temperamen, dan kepribadian (Sulhan 2010:1 dan Koesoema 2010:79).

Secara harfiah, Hornby dan Parnwell (1972:49) menyatakan bahwa arti karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Senada dengan batasan tersebut, Gulo (1982:29) mengatakan bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai kaitan

dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Berbeda dengan Hornby dan Parnwell dan Gulo, Kertajaya (2010:3) menyatakan bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu. Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, Hidayatullah (2010:13) menyatakan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak serta yang membedakan dengan individu.

Karakter dapat dibentuk dan dikembangkan melalui usaha pendidikan. Kajian karakter dari segi pendidikan diistilahkan dengan pendidikan karakter. Pembahasan mengenai pendidikan karakter diungkapkan oleh Koesoema (2010). Pendidikan karakter sebagai hasil dari usaha manusia tidaklah tanpa masalah. Pendidikan karakter menjadi semacam tambahan atau asesoris bagi manusia berupa hasil dari pengembangan dirinya. Secara kodrat manusia diciptakan dalam keadaan fitrah atau bersih atau baik, namun dalam perjalanan hidup manusia mempunyai pengalaman yang membuat dia menjadi baik atau tidak baik.

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan norma yang tinggi. Penjelasan mengenai komponen definisi karakter diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Relatif stabil; suatu kondisi yang apabila telah terbentuk akan tidak mudah diubah. Landasan; Kekuatan yang pengarnya sangat besar/ dominan dan menyeluruh terhadap hal – hal yang terkait langsung dengan kekuatan yang dimaksud. Penampilan perilaku; aktivitas individu atau kelompok dalam bidang dan wilayah (*setting*) dan bidang kehidupan sebagaimana tersebut diatas. Standar nilai/ norma: kondisi yang mengacu kepada kaidah kaidah agama, ilmu, teknologi, hukum, adat, dan kebiasaan, yang tercermin dalam kehidupan sehari – hari seperti: keimanan, dan ketaqwaan, pengendalian diri, disiplin, kerja keras, dan ulet, bertanggung jawab, jujur, membela kebenaran, kepatutan, kesopanan, dan kesantunan, ketaatan pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, musyawarah, dan gotong royong, toleran, tertib, damai, dan anti kekerasan, hemat, konsisten.

Karakter yang baik merupakan hal yang kita inginkan bagi anak-anak kita. Terdiri dari apa sajakah karakter yang baik itu? Seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar sehubungan dengan diri seseorang

dan orang lain. Aristotles mengingatkan kepada kita tentang apa yang cenderung kita lupakan di masa sekarang ini; kehidupan yang berbudi luhur termasuk kebaikan yang berorientasi pada diri sendiri (seperti kontrol diri dan moderasi) sebagaimana halnya dengan kebaikan yang berorientasi pada hal lainnya (seperti kemurahan hati dan belas kasihan), dan kedua jenis kebaikan ini berhubungan. Kita perlu untuk mengendalkikan diri kita sendiri-keinginan kita, hasrat kita untuk melakukan hal yang baik bagi orang lain.

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama Michael Novak, merupakan “Campuran kompatibel dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejaaarah,” sebagaimana yang ditunjukkan Novak, tidak ada seorang pun yang memiliki semua kebaikan itu, dan setiap orang memiliki beberapa kelemahan. Orang-orang dengan karakter yang sering dipuji bisa jadi sangat berbeda antara satu dengan lainnya.

Pendidikan karakter memang muncul sebagai evaluasi terhadap pendidikan yang bertumpu pada titik barat pemikiran modernisme yang bersifat pasitivistik yang membuat jiwa manusia kering akibat industrialisasi yang mengeser nilai-nilai spritual dan kemanusiaan. Positivisme yang memisahkan antara subyek dan objek secara dikotomis dipandang sebagai penyebab

hilangnya dunia makna dalam diri manusia ketika modernisme adalah ideologi yang terkesan menegaskan kesibukan manusia untuk mengeksploitasi alam. Cita-cita kebebasan justru dipisahkan dari keberakatan makna subjektivitas manusia karena terbiasa membuat manusia hanya percaya pada hal-hal yang kasar dan sesuatu yang biasa diverifikasi.

Kesalahan modernisme yang menganggap pendidikan antara lain pengaruh positivisme yang menganggap pendidikan sebagai sarana untuk menaklukkan alam tempat manusia harus takluk pada hukum alam yang dianggap evolusioner. Disini pendidikan kehilangan nilai-nilai yaitu subyektif manusia yang seharusnya dihormati kehilangan maknanya dan tereduksi ke dalam kuantitas-kuantitas capaian material saja. Lebih jauh, dari pihak lain muncul kritik bahwa pendidikan modern kehilangan dimensi transedental dan keruhaniahannya. Pihak inilah yang lebih menekankan pada pendidikan karakter yang menggaungkan kembali semangat agama.

Namun, yang perlu diingat, pendidikan karakter juga bukan hanya pendidikan agama dan pendidikan moral. Pendidikan karakter memiliki banyak varian yang dilahirkan dari pemaknaan terhadap karakter manusia. Kita akan melihat titik tekan yang berbeda dalam lintasan waktu yang tepat, bagaimana pendidikan karakter dimaknai. Oleh karena itu, ada baiknya kita menengok

pendidikan karakter dalam dinamika sejarah dan lintasan wilayah (tempat) yang berbeda-beda.

Pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya, agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan sendirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Pendidikan karakter dipahami pertama-tama sebagai keseluruhan dinamika relasional yang dialami oleh individu di dalam dan bersama dengan lingkungan, penilai utama pendidikan karakter adalah individu itu sendiri.

Karena pendidikan karakter bersifat khas individual, pendidikan karakter perlu memperhatikan potensi diri yang dimiliki individu atau berbasis potensi diri. Menurut Khan (2010:14), pendidikan karakter berbasis potensi diri (individu) merupakan pendidikan yang tidak saja membimbing dan membina setiap anak didik untuk memiliki kompetensi intelektual, keterampilan mekanik, dan pembangunan karakter. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, tujuan yang diinginkan adalah perubahan sikap yang semula kontraproduktif menjadi produktif, inovatif, dan kreatif.

Dalam sejarah peradaban manusia, pendidikan karakter mendapatkan gaung yang suaranya masih terdengar hingga kini

sejak di gemakan oleh Peradaban Yunani Kuno dengan parjara filsufnya. Mungkin karena peradaban itu merupakan tempat cita-cita humanisme muncul, tempat pemikiran-pemikiran yang menjadi cikal bakal nilai-nilai kemanusiaan hingga kini berkembang.

B. Sejarah Pendidikan Karakter

1) Pendidikan Karakter Yunani Kuno

Kesaksian munculnya ide-ide Yunani Kuno yang agung salah satunya dapat dilihat dari karya-karya Homeros. Karya-karyanya tentang visi pendidikan karakter. Karyanya yang cukup terkenal berupa puisi-puisi dalam “Illiad” dan Odisea”.

Homeros menempatkan sejarah sebagai kisah para pahlawan. Para pahlawan yang dimaksud adalah orang-orang besar yang memiliki watak baik. Orang besar yang demikian berarti manusia yang baik (*aner agathos*). keterpesonaanya adalah para watak kaum aristokratis (bangsawan). Ciri-cirinya adalah kaum yang memiliki *arete*, yang mengacu pada kekuatan fisik, yang menghasilkan sifat keberanian, yang membuat identitas terhormat dan sukses tanpa cacat. Ia juga berarti kekuatan, keuletan, kemakmuran, kepandaian, kemuruhan hati, kesehatan, bijaksana, gembira, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Dalam karya epiknya,” Illiad”, Homeros memiliki, sosok pahlawan yang menang dalam pertempuran. Bukan hanya

kekuatan fisiknya, melainkan juga karena reputasi yang layak menjadi patokan karakter generasi berikutnya.

Selain Homeros, pujangga Yunani lainnya juga menyuguhkan, keutamaan tentara (Tirteo dan Callino), keutamaan kegiatan olahraga (Pindaro), nilai-nilai warga negara (Salomo), juga, keutamaan menjadi orang yang pandai bicara dan orasi (misalnya, Kaum Sofis dan Sokrates). Kemudian, juga muncul keutamaan filsafat seperti kita lihat pada Plato.

Keutamaan nilai yang diajarkan oleh Hesiodos yang dasar moralitasnya keadilan dan kerja keras adalah hal yang menarik. Ia menganggap bahwa barangsiapa yang bekerja ia berbuat adil. Ajaran karakter seperti ini bahkan ditujukan pada para hakim, seakan ia adalah nabi keadilan.

Hesiodos yakin bahwa kerja adalah keutamaan, yang menegaskan bahwa konsep *arete* yang pernah dilontarkan Homeros bukan hanya milik kaum bangsawan atau kaum kaya saja. Ia bisa dimiliki oleh banyak dan rakyat biasa, kelas pekerja. Mereka yang tidak bekerja, menurut Hesiodos, berlaku tidak adil dan sulit melihat adanya keadilan.

Jadi, Hesiodos telah menggeser keutamaan nilai bangsawan (orang kaya) dari Homeros menjadi lebih populis yang didasarkan pada keutamaan rakyat mayoritas. Penghargaan atas nilai kerja inilah yang kelak di zaman modern memunculkan filsafat baru yang ingin memberikan penegasan bahwa filsafat dan

nilai-nilai utama manusia itu didasarkan pada kepentingan universal yang berbasis pada kelas pekerja. Filsafat itu adalah Marxisme yang muncul sejak abad ke-19.

Jadi ternyata nilai-nilai moral yang ada di zaman Yunani Kuno. Di Yunani telah muncul banyak filsuf dengan penekanan yang berbeda-beda meskipun berujung pada nilai-nilai humanisme dan demokrasi. Homeros dan Hesiodos adalah dua nama sejarawan dan pujangga yang mampu menangkap nilai-nilai yang muncul.

Ada nama lainnya, seperti Tirteo, yang mengungkap munculnya keutamaan yang ada pada orang-orang yang sangat nasionalis yang suka bertempur demi negaranya. Ia merujuk pada Sparta sebagai bangsa yang memiliki nilai keutamaan semacam itu. Ini adalah semangat baru bagi warga negara. Sparta mengajarkan bagaimana patriotisme adalah nilai yang sangat penting, tempat warga harus mengabdikan diri pada negaranya dan harus diikuti kebenaran untuk berkorban dan menghilangkan kepentingan-kepentingan individu.

Berbeda lagi dengan negara kota yang bernama Athrna. Jika Sparta berkarakter patriotis dan suka berperang dengan penuh keberanian, Athena identik dengan nilai-nilai demokratis dan dipenuhi banyak pemikiran filsafat dan keindahan. Athena pernah menjadi saksi dari para pemberani yang suka berperang, tetapi kemudian mengalami perubahan yang signifikan menuju

negara kota yang diwarnai dengan upaya mencari kebijakan, karakter militer menghilang berubah menjadi masyarakat sipil yang melahirkan nilai-nilai yang kelak menjadi cikal bakal pengetahuan manusia. Kemajuan masyarakat sipil terjadi sejak Athena dipelopori oleh Solon (630-560 SM). Ia adalah seorang pembaru yang sangat keranjingan akan seni dan kebudayaan. Posisinya sebagai *arconte* (semacam anggota legislatif di Yunani yang punya kewenangan menjalankan pemerintahan) sangat menentukan sejarah ketika ia memulai sebuah konsensus bersama antar warga polis. Ia tanggung jawab dan hak para bangsawan saja, melainkan juga seluruh warga negara.

Kehidupan sipil semakin berkembang masa kerajaan terjadi di Athena Pada masa Perikles (sekitar abad ke-5 SM). Pendidikan mulai menjadi kegiatan yang berguna untuk mendidik nilai-nilai sipil. Pendidikan sipil berbasis pada disebarkannya nilai-nilai demokrasi dan hak-hak individu, tempat seni menyampaikan gagasan sangat terkenal terutama seni berbicara melalui retorika dan orasi. Nilai-nilai yang dibawa kaum Sofis ini sangat penting sekali artinya untuk menciptakan karakter politik yang demokratis. Orang-orang mulai tertarik pada pencarian akan kebijaksanaan dan penyampaian gagasan yang dilakukan dengan kata-kata yang indah dan menarik.

Kaum Sofis dicap secara negatif sebagai kaum yang hanya suka bersilat lidah. Mereka dianggap hanya menghabiskan

banyak waktu untuk seni bicara, tetapi kurang peduli pada kebenaran. Di sinilah kemudian mulai terpikirkan pentingnya nilai-nilai kebenaran dan esensi dari suatu pikiran. Inilah yang kemudian memunculkan Socrates (470-399 SM) yang mengajak untuk kembali pada kedalam jiwa manusia dan bukan pada teknik-teknik bicara indah. Pernyataanya yang cukup terkenal adalah “Kenalilah dirimu sendiri”, bukan hanya nama, melainkan sebagai esensi jiwa yang membedakan kita dengan makhluk rendah lainnya.

Sumbangannya pada filsafat dan jalan menuju kebijaksanaan berpijak pada kebutuhan manusia untuk mulai mengenal dunia melalui pengetahuan. Metode yang diperkenalkannya adalah metode pengujian realitas secara induktif. Upaya Socrates untuk mencurahkan perhatiannya pada perkembangan metodologi atau model prosedural untuk mencapai kebenaran sampai ditemukannya metode definisi atau dialektika dalam hal pengujian secara kritis terhadap kebenaran sebuah opini.

Melalui proses tanya jawab secara terus-menerus, dia berupaya menembus esensi atau hakikat subyek, seperti keadilan atau kebebasan, untuk sampai pada definisi yang universal. Pertama-tama, ia mencari definisi superfisial istilah tersebut dan para pendengarnya dan kemudian, melalui pengujian silang, mengajak mereka untuk melihat kekurangan-kekurangannya.

Pertanyaan-pertanyaan selalu mengarahkan mereka secara perlahan-lahan dan terasa ke wilayah yang dia yakini sebagai tempat kebenaran. Setiap langkah diarahkan pada inspeksi kritis terhadap akal. Socrates menyebut metode ini dengan *maieutic* (dari bahasa Yunani *maieutikos* yang berarti bidan). Meski demikian, seni perbidanan intelektual-lah yang mencoba melepaskan pemikiran yang tertidur dari pemikirannya dan mengarahkannya untuk mencapai esensi. Metode Socrates yang baik, digambarkan dalam dialog-dialog Plato, muridnya yang juga merupakan filsuf politik yang lebih nyata dibandingkan Socrates.

Bagi Socrates, formulasi doktrin kebaikan adalah pengetahuan. Menurutnya, orang yang bijak adalah orang yang mengetahui sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang bodoh. Pengetahuan yang benar akan membimbing pada tindakan yang benar. Tindakan jahat adalah akibat dari wawasan yang kurang baik. Tak terbayangkan olehnya bahwa seseorang yang mengetahui dasar kebaikan dan kebenaran akan berbuat jahat. Karena tidak ada manusia yang berbuat dosa secara sengaja, pengetahuan diperlukan untuk membuatnya benar-benar bijak. Karenanya, wajib untuk mengajar manusia agar mengerti dan memahami agungnya kebenaran hidup. Dengan mengetahui kebenaran itu, manusia akan berbuat secara bijak dan akan memperbaiki kerusakan masyarakat.

Ajaran yang dapat kita petik tentang karakter Socrates adalah bahwa nilai-nilai yang lahir dari pengetahuan yang benar amatlah penting bagi pembentukan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang. Tanpa pengetahuan yang benar tentang nilai moral, akan sulit bagi orang untuk melakukan suatu tindakan yang bermoral. Sebab, tindakan moral adalah tindakan dasar dan bebas yang dilakukan demi kepentingan nilai dalam diri seseorang tersebut.

Setelah Socrates, muncul nama Plato (429-347 SM) yang merupakan murid Socrates. Saat Socrates dihukum mati dengan cara minum racun, Plato berusia 29 tahun. Plato adalah pendidik karakter yang nyata karena mendirikan Perguruan Tinggi filsafat di sebuah hutan kecil yang tak jauh dari Athena, yang namanya diambil dari nama pahlawan legendaris Yunani. Academicus. Inilah asal mula munculnya istilah *akademi* yang setelahnya ribuan “akademi” bermunculan di berbagai belahan dunia. Di akademi itu Plato mengajar selama 40 tahun, hanya terputus sementara karena kepergiannya ke Sisilia beberapa kali. Dalam usianya yang ke 81 tahun, ia meninggal di Athena.

Pendidikan karakter Plato diabaikan untuk mengejar keutamaan hidup masa ketika pendidikan yang hanya mengejar sukses, rasa hormat, apalagi popularitas dianggap sebagai karakter yang rendah. Plato berusaha mencetak karakter dengan ukuran bahwa seseorang pemimpin itu haruslah orang yang

bijaksana. Ia percaya bahwa pemimpin yang bijaksana adalah filsuf.

Prajurit adalah menggunakan kebesaran nafsu dan jiwanya yang berani. Kelas ini mencakup golongan militer dan pejarab administaratif, tugasnya menjaga negara dan menegakkan hukum. Sedangkan, produsen dikaitkan dengan panca inderanya. Mereka adalah bagian besar dari rakyat yang bertugas menyediakan kebutuhan material untuk masyarakat.

Mengapa memilih karakter utama adalah orang yang punya kebijakan akibat pengetahuanya? Sebab, kebijakan adalah pengetahuan. Dalam hal ini, ada tiga konsep yang harus dipahami. Pertama, kebenaran harus obyektif dan tidak berubah agar kita hanya bisa mencapai pengetahuan mengenainya. Sebaliknya, kita hanya bisa memiliki opini dan bukannya pengetahuan yang sejati. Kedua, karena kebajikan disamakan dengan pengetahuan, orang yang mengetahui harus diberi peran menentukan dalam urusan publik. Tugas untuk menemukan penguasa yang baik dan bijak, dengan demikian, dilakukan dengan ujian pengajaran. Ketiga, negara harus mengambil peran aktif dalam mendidik rakyatnya. Khususnya kepada orang-orang yang percaya dengan bimbingan dan arahan kehidupan publik. Suatu masyarakat yang semakin bijak dan berfungsi secara baik dan dibantu dengan pelatihan hingga memperoleh kemampuan yang luas.

Pendidikan karakter Plato berangkat dari kepercayaan bahwa dengan mencetak orang-orang yang bijak, kita bisa menciptakan negara yang ideal. Tujuan negara dalam konsep Plato memang tampak ideal sekali. Karena negara adalah kesejahteraan bersama. Kata Plato “Tujuan kita menegakkan negara bukanlah ketidakseimbangan kebahagiaan kelas tertentu, melainkan demi kebahagiaan buat semua”.

Pemikiran politik Plato yang sangat klasik bisa saja dianggap tak sesuai dengan politik modern sekarang ini. Akan tetapi, ada hal-hal yang menarik yang masih harus dipertahankan. Peran pokok yang harus dimainkan oleh pendidikan bagi warga masyarakat merupakan tekanan pemikirannya yang harus dilakukan negara dan kekuatan politik saat ini, terutama di Indonesia. Ketidaksukaannya pada korupsi dan penyelewengan kekuasaan, serta mimpi indah tentang tanggung jawab negara untuk kesejahteraan umum dan masyarakat masih sangat relevan untuk konteks negara sekarang ini.

Nama Aristoteles (384-322 SM) muncul menggantikan Plato, gurunya di Akademia. Beda Aristoteles dengan gurunya adalah jika Plato sangat asyik dengan bentuk-bentuk yang bersifat kekal seperti “ide-ide”, Aristoteles justru sangat tertarik untuk memperhatikan perubahan-perubahan atau apa yang dinamakan sebagai proses alam. Aristoteles justru sangat tertarik untuk memperhatikan perubahan-perubahan atau apa yang dinamakan

sebagai proses alam. Aristoteles ingin menyelidiki sifat-sifat umum dari segala yang ada di dunia ini. “Prima philosophia”, yaitu filsafat yang pertama dan utama, mencari hakikat yang terdalam dari apa yang ada. Jadi, filsafatnya adalah ajaran tentang kenyataan atau antologi, suatu cara berfikir realitis (lawan dari filsafat idealitis).

Salah satu karya terkenal adalah yang ditulis Aristoteles, yaitu *Etika Nikomakea*. Dalam buku ini, ia mengatakan bahwa hidup harus bertujuan pada *eudamania* yang bila dipahami akan menghasilkan perbuatan dan moral yang baik dan bijak. Sebenarnya, buku itu adalah kumpulan tulisan yang awalnya adalah catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum yang kemudian dibukukan sebagai persembahan untuk Nikomachus, anak anak laki-lakinya.

Etika Aristoteles dikenal sebagai etika yang bersifat teleologis etika yang terarah pada tujuan. Aristoteles berpandangan bahwa segala sesuatu pasti memiliki maksud dan tujuan. Sebagai contoh: sebilah pisau dibuat dengan tujuan untuk mengiris, memotong, dan lain sebagainya. Manusia hidup juga memiliki tujuan. Manusia menciptakan segala sesuatu dengan tujuan-tujuan sehingga dari kecakapan, tindakan dan capaian pengetahuan juga mempunyai tujuan, misalnya menciptakan obat-obatan demi kesehatan, menciptakan ilmu untuk membantu memudahkan hidup, dan lain-lain. Singkatnya menurut

Aristoteles (Larry P. Nucci & Darcia N, 2014: 154) menyatakan bahwa “watak manusia pada umumnya dan khususnya kebaikan moral tergantung pada gagasan tujuan dasar manusia”. Dari pendapat tersebut, maka pendidikan moral didasarkan pada disposisi yang memerlukan pelatihan praktis yang sejalan dengan otoritas moral itu sendiri.

Dalam memaknai pendidikan pun akhirnya ia menekankan pada tujuan praktis sebuah pendidikan. Tujuan praktis ini merupakan kebijaksanaan harian yang berurusan erat dengan dimensi etis dan politis. Sikap terhadap etika ini disebut “Etika Kebijakan” atau etika yang berpusat pada watak: tindakan-tindakan setiap orang harus membuat orang itu lebih baik dan membangun watak yang lebih baik pula. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang pemberani (demikian asumsi Aristoteles) bila kita umumnya melakukan tindakan-tindakan yang berani apabila kesempatan itu muncul. Etika Nikomakea dianggap sebagai salah satu contoh dari etika kebijakan seperti itu. Kita sepakat dengan Aristoteles bahwa kebijakan intelektual adalah suatu nilai yang harus dijunjung tinggi. Aristoteles menguraikan lima kebijakan intelektual, di antaranya: pengetahuan seni, kehati-hatian, intuisi, dan kebijaksanaan.

Setelah Aristoteles, ternyata kemudian ada pembalikan sejarah yang akan mulai mengakhiri kejayaan Yunani. Setelah meninggalnya Iskandar pada tahun 232 SM, dunia terpecah-

pecah. Maka, di negeri Yunani muncul perserikatan-perserikatan kota-kota seperti Aetolia dan Archaia, yang merupakan pemerintahan merdeka yang terbetuk serikat. Keadaan ini berlangsung terus sampai negeri Yunani nantinya menjadi bagian dari kerajaan Romawi.

Era transisi menandai terdesaknya universalisme Yunani yang dijunjung sejak Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sekitar 300 SM, muncul tokoh bernama Epicurus (341-270), seorang yang pernah menjadi murid Socrates. Pandangan Epicurus banyak dipengaruhi oleh etika kenikmatan Artippus, yang percaya bahwa tujuan hidup adalah kenikmatan indrawi setinggi mungkin. “Kebaikan tertinggi adalah kenikmatan. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan. Tentu saja bukan hanya kenikmatan fisik saja yang masuk dalam kategori itu. Nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian juga masuk di dalamnya”.

Pandangan tersebut tampaknya menjadi anti tesis dari kecenderungan Yunani Kuno penuh dengan ajaran bahwa hidup diperlukan kontrol diri, kesederhanaan, dan ketulusan, nafsu harus dikekang dan ketentraman hati akan membantu kita menahan penderitaan. Kecenderungan filsafat Epicurean (aliran Epicurus ini) dapat dikatakan materialistik, yang mengajarkan bahwa karakter manusia yang baik itu ditekankan pada upaya mencari kesenangan material. Ia beranggapan bahwa jiwa tidak

lebih diraba, seperti partikel napas dan tekanan darah yang tersebar di seluruh tubuh.

Epicurus menolak bahwa ada kebajikan dan nilai moral instrinsik atau standart objektif bagi kebenaran dan kesalahan. Menurutnya tindakan yang menyebabkan kealpaan tau kejahatan disebabkan tindakan tersebut membuat tidak nyaman atau menyebabkan sakit. Filsafat materialisme yang dipegangnya membuat ia beranggapan bahwa jika kebahagiaan terdiri dari kebebasan dari segala kesusahan dan kekhawatiran, tanggung jawab moral pribadi dan rasa takut akan kesadaran dan agama tidak bisa memperoleh tempat dalam kehidupan.

Jika Sebelumnya Plato berupaya memperbaiki kecendrungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektik. Kemudia Ariestoteles hendak mempertahankan keadaan dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan tentang kenyataan yang sebenarnya, epicurus justru dengan sikap pemikirannya yang acuh tak acuh karena terpaksa, yang memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, dan tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena pemikiran seperti itulah, Epicurus melukiskan negara dan hukum hanya sebagai saat yang ternyata tak mempunyai nilai yang sama sekali untuk kemudian hari. Artinya, karakter yang dibangunnya berlandaskan pesimisme atas ukuran-ukuran moral dan etika.

2) Pendidikan Karakter Romawi dan Abad Pertengahan.

Datangnya era Romawi harus dilihat dari kontinuitas sejarah sebelumnya. Ketika pengaruh Yunani tak menghilang sama sekali. Dalam sejarah pemikiran politik, Romawi dapat dikatakan membawa gagasan yang merupakan transisi dari era Yunani Kuno menuju pemikiran Eropa barat Era Modern. Periode Romawi dikenal bukan karena teori politiknya, melainkan karena hukumnya, dan dalam hal tertentu juga karena administrasinya. Di bidang inilah, Romawi meninggalkan warisannya pada Barat. Pendidikan karakter di era Romawi lebih banyak dibentuk melalui keluarga. Pendidikan karakter menekankan dipegangnya nilai-nilai yang disosialisasikan melalui keluarga. Nilai-nilai yang mengandung unsur tradisi yang diwariskan oleh para leluhur. Unsur-unsur karakter yang menonjol dari bangsa Roma adalah nilai-nilai seperti mengutamakan kebaikan tanah air, devosi (*la pietas*) atau penyembahan dan penghormatan pada para dewa, kesetiaan (*la fides*), perilaku yang berkualitas (*la gravitas*), dan nilai-nilai stabilitas (*la constantia*).

Pada era berikutnya, kita menjumpai bagaimana pendidikan karakter sangat dipengaruhi oleh ajaran kristiani telah memunculnya agama ini, yang menandai abad agama yang kadang juga disebut sebagai abad Kegelapan (*The Dark Age*)

sebelum munculnya revolusi Industri dan zaman pencerahan. Era “kegelapan” terjadi ketika pendidikan dan arahnya dihegemoni oleh gereja.

Pendidikan karakter di era ini identik dengan pendidikan moral agama yang memang menawarkan konsep-konsep moral dan nilai yang dipandang sebagai jawaban atas masalah-masalah moral sebelumnya. Salah satu adalah bobroknya kekuasaan Roma, baik secara moral ataupun politik. Meskipun mendapatkan legitimasi dan dasar yuridis (hukum) yang kuat, kerajaan Romawi pada telah jatuh dalam keadaan yang bobrok dan lemah. Pemerintahan Daerah (Propinsi) menjadi Demoral dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri serta sangat korup. Di kota-kota Romawi juga kedatangan kaum miskin dan para gembel yang menimbulkan berbagai macam kerusuhan sekaligus perlawanan. pada ranah pemikieran, permulaan abad Masehi diwarnai dengan situasi serba putus harapan. Para kaisar pun kian despotik dan korup. Dalam situasi itulah. Ajaran Kristiani mendapatkan pengaruh yang luar biasa. Kelahiran Yesus dan pertumbuhannya yang bersahaja menghipnotis orang-orang Romawi. Pengikut Yesus dari Nasareth semakin banyak pengikutnya, membawa agama baru bagi kerajaan, juga menyebarkan kesadaran baru, pemahaman baru, dan harapan baru akan pengampunan. Dengan cepat ajaran Kristen memasuki

masyarakat. Yang belakangan juga mendapatkan penerimaan di lingkungan politik negara, hingga gereja mengendalikan negara.

Pendidikan untuk anak-anak diarahkan pada karakter religius sesuai dengan ajaran Kristiani. Cita-cita pendidikan kristiani ini adalah mengarahkan pribadi agar mampu memberikan tanggapan bebasnya atas tawaran cinta kasih Allah yang telah menebus dosa-dosa mereka sehingga mereka, dengan pertolongan dan Rahmat Allah, sampai pada kekudusan, menjadi seorang santo dan santa.

Pada kenyataanya, pendidikan karakter Kristiani diolah berdasarkan keinginan kekuasaan para aristokrat yang berlandung pada gereja dan hal ini memunculkan berbagai reaksi. Di kalangan penganut Kristen mulai muncul berbagai gerakan yang mempertanyakan posisi kekuasaan Abad Pertengahan. Ada pandangan bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan lebih penting dari pada hubungan manusia dan gereja. Artinya, mulai muncul gejala ketika otoritas gereja mulai dipertanyakan.

Protes yang cukup signifikan dalam sejarah gereja terjadi pada 31 oktober 1517, saat seorang pendeta Augustinian yang bernama Martin Luther menempelkan 95 pernyataan bersejarah di pintu gerjea kastil di Wittenberg. Martin Luther tidak puas dengan hierarki gereja dan hukum gereja, yang dianggapnya tidak berdasarkan kitab suci dan hanya digunakan untuk memperoleh kekayaan duniawi. Dominasi gereja dan ketidakpuasannya itu

seiring dengan kebangkitan cintanya pada kebangsaan Jerman. Akhirnya, ia mempermasalahkan hubungan anatara gereja dan negara. Ketika kaisar Jerman berselisih dengan raja-raja, mula-mula Luther mengajarkan bahwa kaum Kristen boleh membela diri terhadap pemerintahan yang sewenang-wenang jika kaisar melanggar undang-undang, baginya rakyat tak usah mematuhi.

Pada saat yang sama moralitas gereja semakin tersingkir oleh ide-ide baru yang dibawa oleh Era Pencerahan (*Renaissance*) begitulah banyak orang menyebutkannya. Era ini terjadi mulai abad ke-14 hingga ke -16. Tentunya, tak ada perkembangan pemikiran yang tak disebabkan oleh dinamika material ekonomi. Ketika legitimasi dan dominasi gereja mulai berkurang, campur tangan gereja terhadap politik dan urusan negara mulai di gugat. Di sinilah paham sekularisme muncul, keinginan untuk memisahkan urusan agama dari masalah negara/ politik. Orang lebih menyukai pengetahuan dan kebebasan berekspresi dari pada cara berfikir yang terkekang, jadi, ini adalah era pembangunan katedral-katedral megah yang menjadi simbol kejayaan Tuhan, sekarang diarahkan pada pemujaan kepada manusia.

3) Pendidikan Karakter Era Modern

Inilah yang membuat era baru bernama “modernisasi” memusatkan diri pada manusia (antroposentrisme). Pandangan subyektif berusaha disingkirkan karena manusia dengan bantuan pengetahuan dan rasionalitas telah dibimbing untuk melihat alam secara obyektif karena alam adalah obyek yang akan dianalisis dan di manfaatkan untuk mengembangkan kehidupannya.

Ludwig Feuerbach dalam *The Essence of Chritianity* berkata “Agama adalah sebuah mimpi, di mana pandangan dan emosi kita muncul dihadapan kita sebagai satu keberadaan yang mandiri, yang hadir di luar diri kita. Pemikiran religius tidaklah membedakan mana yang subyektif, mana yang obyektif pemikirang itu tidak memiliki keraguan; ia memiliki berkah, bukan dalam kemampuan memahami hal-hal di luar dirinya, tetapi dalam melihat dirinya sesuai pandangan sendiri sebagai suatu keberadaan yang khusus dan istimewa.

Pendikotomian subyek dengan obyek itulah yang kemudian dianggap sebagai penyebab munculnya berbagai macam kekeringan makna dalam pribadi-pribadi modern. Modernisasi kapitalis dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya (kemiskinan dan pemiskinan, kerusakan lingkungan alam, budaya dangkal, dan lain-lain) muncul karena manusia dianggap terpisah dari maksna subyektifnya dalam kehidupan. Kesibukan hidup dalam rangka mengejar kemajuan

dan pertumbuhan material semata, dianggap telah memunculkan masalah-masalah baru dalam ranah karakter manusia.

Jika berbicara mengenai ketidakbermaknaan hidup dan rusaknya karakter manusia dalam era modern, ada pandangan yang menyatakan bahwa manusia telah kehilangan spritualitas yang hanya dijawab dengan agama. Mereka menawarkan pendidikan karakter yang menekankan pada pendidikan moral agama, yang dapat dianggap sebagai solusi atau masalah-masalah modernitas.

Akan tetapi, ada juga pandangan bahwa hal itu bukan hanya masalah pemaknaan religius semata. Rusaknya moral bukanlah masalah internal subyek manusia, melainkan subyektivitas itu juga harus dipahami sebagai bagian dari kehidupan material secara umum. Dalam hal ini, hilangnya subjektivitas bukan semata disebabkan dari dalam dirinya, melainkan oleh kondisi lingkungan sosial yang membentuk subyek tersenut yang bahkan menjadikan manusia sebagai obyek Eksploitasi sebagai contoh munculnya masalah kemanusiaan dan rusaknya karakter dan kepribadian manusia bukan semata tanggung jawab manusia secara individu, melainkan lebih banyak dibentuk oleh kondisi sosial yang ada. Maka pendidikan karakter ditwarkan untuk mengatasi masalah manusia tidak cukup hanya dengan mengisimya dengan moral agama, tetapi juga diisi dengan penyadaran akan realitas dan mengaktifkan potensi

gerakan manusia untuk mengatasi realitas yang ternyata terselenggaranya dan menurunkan karakter kemanusiaanya.

Pandangan pertama tadi mengandaikan pentingnya pendidikan agama yang oleh sebagian orang dan kelompok harus didoktrinkan secara total untuk mengatur manusia dan membentuk karakternya. Pembentukan karakter melalui pendidikan agama banyak dikritik akan menimbulkan potensi akal kritis manusia karena anak-anak hanya diberikan emosi-emosi tertentu yang kadang tak sesuai dengan tindakan yang diperlukan. Dalam esainya yang berjudul” Agama dalam Pendidikan”. Bettrand Russell mengungkapkan beberapa sisi buruk pendidikan agama.”

Pertama, anak-anak yang sangat cerdas, yang menemukan melalui pemikiran bahwa argumen-argumen mengenai kekekalan itu tidak pasti, akan dipatahkan semangatnya oleh guru-gurunya, bahwa mungkin dihukum: dan anak-anak yang lain memperhatikan kecenderungan untuk berfikir serupa, akan dikecutkan hatinya dari percakapan mengenai topik-topik semacam itu, dan mungkin dicegah dari membaca buku-buku yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka dan kekuatan penalaran mereka.

Kedua, karena dewasa ini kebanyakan orang yang kecerdasanya jauh berada di atas rata-rata agnostik (cuek pada agama) secara terbuka atau diam-diam, para guru di Perguruan

Tinggi yang mendesakkan agama tentu saja tolol dan munafik, kecuali bila mereka merupakan bagian dari kelas kecil orang-orang yang karena suatu kekusutan mempunyai kemampuan intelektual tanpa pertimbangan intelektual. Apa yang terjadi dalam praktik adalah bahwa orang-orang yang berniat menyetujui profesi skolastik mulai menutup benak mereka bagi pemikiran-pemikiran petualangan sejak usia dini. Mereka menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian melalui suatu transisi yang alamiah dalam segala hal yang lain. Mereka menjadi penakut dan konvensional dalam teologi dan kemudian melalui suatu transisi yang alamiah dalam segala hal yang lain. Seperti serigala yang telah kehilangan ekornya. Mereka memberitahukan murid-murid mereka bahwa baik untuk menjadi jinak dan konvensional.

Ketiga, mustahil untuk menanamkan semangat ilmiah pada orang muda selama setiap proposisi dianggap keramat dan tidak terbuka untuk dipertanyakan. Merupakan intisari dari sikap ilmiah bahwa secara ilmiah menuntut bukti atas apa saja yang ingin dipercaya dan bahwa sikap ilmiah mengikuti bukti itu tak peduli arah tujuannya.

Kritik Bertrand Russell tersebut memang lahir untuk melihat apa yang terjadi di Barat, sebuah kehidupan yang sekuler dan tampaknya menganggap aneh hal-hal yang barbau agama dan mistik dengan sains yang memiliki pendekatan yang berbeda-

beda adalah sesuatu yang aneh. Sains menginginkan peserta didik yang mengetahui dan menyadari realitas alam dan mampu menguak hubungan sosial, terutama demi kemajuan dan kedamaian kehidupan sesuai ideal-ideal kemanusiaan yang diukur dalam patokan ilmiah. Sedangkan, agama dan mistik berisi pandangan bahwa hidup ini sudah diatur oleh sesuatu di luar kehendak manusia.

Pendidikan karakter dalam konsep agama tidak melihat bahwa karakter yang ada di dalam diri anak adalah produk dialektika dengan pengalaman historisnya dan sejarah hubungannya dengan orang lain. Apalagi, agama yang ditafsirkan secara kaku akan mengatakan bahwa ukuran baik buruk dilihat dari hasilnya yang instan, bukan sebagai produk relasi sosial yang menghasilkan hubungan kekuasaan. Keberagaman semacam itu hanya tahu “halal” dan “haram” berdasarkan teks yang ditafsirkan secara saklek dan diseleksi atau ditasirkan sesuai dengan kepentingan tertentu.

Akhirnya, tindakan tertentu yang bisa jadi dikendalikan oleh kepribadian dan karakter seseorang divonis begitu saja tanpa mendialektika kan dengan hubungan-hubungan konkret yang bisa dianalisis berdasarkan kenyataan materialnya. Maka, yang ada hanyalah vonis-vonis yang kadang mematikan karakter seseorang dalam masyarakat.

Perlu diingat bahwa penilaian terhadap karakter seseorang kadang merupakan “pembunuhan karakter” yang membuat orang yang dinilai menerima dampak psikologis luar biasa, bayangkan jika orang miskin dinilai berdasarkan kemiskinannya tanpa melihatnya sebagai produk masyarakat (pemiskinan akibat sistem). Maka, pendidik moral dan boleh itu sembari tidak menyerukan sama sekali terhadap tindakan jahat para penguasa. Sasaran pendidikan moral agama adalah anak-anak orang miskin dengan menitikberatkan pada ajaran-ajaran tekstual yang harus dihafal, yang biasanya dipilih sesuai kepentingan kekuasaan. Sedangkan ayat-ayat yang dapat ditafsirkan untuk memahami situasi pemiskinan hampir sama sekali tidak dimunculkan.

Di era modern yang kapitalistik dengan ciri krisis kesajahteraan rakyat, dominasi pendidikan karakter fatalistik berisi doktrin-doktrin agama yang membuat generasi pasrah memiliki efek psikologis tertentu. Di era globalisasi kapitalis ketika Indonesia berada dalam posisi kalah (paling terisap dalam hubungan global), pembangunan karakter fatalisme dan tradisionalisme dapat dikatakan sebagai reaksi dari perkembangan sosial yang cepat dan tidak mampu dihadapi sehingga perasaan akan pentingnya nilai-nilai tradisi (onah) bangkit kembali. Tradisi dijadikan tameng, dibangkitkan, untuk

mencari “makna” agar kekalahan dalam bersaing dengan pendidikan dan iptek dan negara lain mendapatkan hiburan.

Salah satu bentuk pendidikan tradisional yang awalnya berisi penuh ajaran agama adalah pondok pesantren. Lembaga pendidikan ini kini mencoba menempatkan diri sebagai lembaga pendidikan yang melengkapi diri dengan ilmu modern agar murid-murid pondok pesantren tidak ketinggalan dengan modernisasi kapitalis, bahkan juga mengaku ingin bersaing dalam kancah global. Mereka berusaha melakukan pembaruan dan melakukan modernisasi pendidikan lembaga pesanteren ini.

Biasanya, jargon yang menjadi tujuannya adalah untuk mencetak generasi beriman dan bertaqwa, tetapi tetap tak ketinggalan dalam persaingan di era modern (globalisasi). Tujuan manisnya adalah untuk mencetak karakter generasi yang menguasai iptek dan imtaq, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan iman takwa. Ini adalah ekspresi yang wajar sebagai hukum dialektika antara pendidikan tradisional berhadapan dengan perkembangan modern yang dianggap merusak moral dan kemanusiaan dari sudut pemahaman agama. Akan tetapi, karena basisnya adalah pondok pesantren, sisa-sisa karakter tradisionalnya secara nyata masih kelihatan. Misalnya, pola hubungan antara murid dan guru (atau tepatnya antara santri dan ustad atau sangkai). Meskipun metode pengajaran dan

peralatannya semakin canggih, ada tetap yang tertinggal; feodalisme.

Sebagian besar pesantren mengembangkan pendidikan yang canggih, berisi peralatan lengkap, dikomandani para guru yang punya kualitas akademis bagus dan cerdas, dengan fasilitas yang sangat maju. Lembaga pendidikan tradisional ini mencoba mendandani dirinya dengan kemajuan, menawarkan pada orang tua suatu proses pelatihan dan pendidikan yang membuat kecerdasan anak melejit dan tingkat kecerdasannya akan jauh lebih tinggi dari pada Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi yang biasa. Beberapa Perguruan Tinggi baru yang dibangun juga berusaha meniru model pesantren, berusaha memodernisasikan diri dengan tujuan agar Perguruannya didatangi banyak anak dengan cara menjual citra “pesantren” atau pendidikan yang banyak mengajarkan moral agama.

Rata-rata pesantren modern yang mengadopsi pendidikan modern ini juga menerapkan model *full day school* untuk memaksimalkan peran pencerdasan dan pembentukan mentalnya pada anak-anak. Sebagian besar memang dikelola untuk menjadi lembaga pendidikan komersial agar banyak orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya dengan membayar sejumlah biaya pendidikan yang cukup banyak. Penulis terikat apa yang ditulis Vernon Smith. Orang tua ideal bagi pendidikan tradisional adalah yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari

Perguruan Tinggi, tetapi mengirim uang ke sana sesering-seringnya.

Sistem pendidikan ini memang berusaha memelihara tradisi model pesantren sejak lama, tempat anak-anak didik (santri) harus secara penuh berada di lembaga pendidikan. Anak-anak didik ini jauh dari orang tua. Baik orang tua yang merasa tak mampu atau malas mendidik anaknya di rumah atau yang tak mampu atau malas mendidik anaknya di rumah atau tak mau repot mengontrol “moral” dan “mental” anak yang Perguruan Tinggi di Perguruan Tinggi “biasa” (umum), atau yang takut dampak sistem pendidikan non agama yang banyak memberi pelajaran moral dan agama bagi anak-anak, mereka memang akan lebih suka mengeluarkan banyak uang dari pada melakukan fungsinya sebagai pengarah dan pengontrol anaknya di rumah dan ataupun pergaulan di luar rumah dan Perguruan Tinggi.

Dari berbagai penelitian dan kabar berita yang kita simak. ketahuan bahwa di beberapa lembaga pendidikan agama, seperti pondok pesantren yang memang sudah mengadopsi pula Perguruan Tinggi moder juga muncul pendidikan karakter yang mencoba menegaskan diri untuk membentuk kader-kader yang memahami agama, bahkan secara keras. Anak-anak didoktrin dengan tafsiran agama yang ketat dan sempit agar mereka bisa diarahkan kepada gerakan-gerakan jihad yang menghalalkan kekerasan dan siap berperang. Negara sering menyebut mereka

sebagai teroris. Pembangunan karakter yang dibentuk di sini adalah membangun keberanian untuk berperang (perjuangan bersenjata) untuk mewujudkan cita-cita negara agama dan menganggap bahwa tafsir mereka sendiri tentang agama adalah yang paling benar, yang tidak sesuai dengan mereka dianggap “kafir” yang layak dimusuhi.

Bagi kita yang berpikiran terbuka dan demokratis, pembangunan karakter yang berusaha diarahkan pada tingkah laku politik ideologis tertentu semacam itu amat memperhatikan. Anak-anak menjadi korban doktrin paham sempit keagamaan yang ternyata menguntungkan orang tua yang ingin berpolitik memakai baju agama. Bukan rahasia umum bahwa generasi teroris adalah hasil didikan pesantren yang diantaranya masih berusia amat muda, belia, bahkan bisa digolongkan masih anak-anak.

Ini memang gejala era sekarang ini, ketika kapitalisme menimbulkan krisis kesejahteraan yang menimbulkan krisis eksistensi diri, pendidikan karakter dibangun sesuai dengan kepentingan kelompok-kelompok orang yang gagap untuk memaknai kehidupan secara benar. Kondisi tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita semua. Anak-anak dan kaum remaja belia yang seharusnya mendapatkan hak-haknya untuk bertumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat jasmani dan rohani, harus diselamatkan dan kecamuk politik dan konflik ideologi.

Yang penting sebenarnya adalah pencegahan. Kita harus mempersiapkan suatu kondisi masyarakat yang membuat anak-anak sebagai korban. Korban adalah mereka yang terpinggirkan. Tidak mungkin anak-anak akan mewarisi ideologi kekerasan jika mereka tidak menjadi bagian dari mereka yang terpinggirkan, teraniaya, bahkan terdesak. Kalau kita lihat anak-anak yang direkrut dalam gerakan yang menggunakan teror dan kekerasan adalah mereka yang secara ekonomi miskin. Selain itu, juga mereka yang mendalam karena orang tua dan saudara dekat mereka juga menjadi korban. Lihatlah anak-anak yang dibesarkan di daerah konflik, seperti di Jalur Gaza, anak-anak tidak lagi memikirkan bagaimana supaya mereka bisa Perguruan Tinggi dan belajar atau bermain. Sejak kecil mereka diajari merakit bom, memegang senjata, dan dilatih untuk menyerang musuh. Karena mereka tidak memiliki apa-apa lagi orang tua dan saudara-saudaranya telah mati terkena bom yang diluncurkan Israel.

Masih ingat beberapa tahun lalu, serangan Israel ke Jalur Gaza dan wilayah-wilayah lain di Palestina benar - benar menimbulkan dampak kemanusiaan yang luar biasa. Ketika serangan itu juga memangsa anak-anak yang tidak berdosa, yang seharusnya mendapatkan suasana yang damai dan sejahtera bagi perkembangannya adalah hal yang dibayangkan. Sekitar 50 persen penduduk Jalur Gaza adalah anak-anak dari korban tewas. 220 di antaranya adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun.

Anak-anak yang selamat pun akan menghadapi masalah. Mereka terkejut, menangis, untuk sebuah alasan yang tidak mereka tahu karena ada yang berusia di bawah lima tahun. Masalah yang dihadapi anak-anak akan meningkat karena keluarga mereka terpaksa melarikan diri menghindari serangan dan sebagian rumah mereka telah rata dengan tanah. Padahal, sebelum serangan Israel, sekitar tahun 50.000 anak Palestina sudah kekurangan gizi akibat blokade Israel selama 18 bulan terakhir di Jalur Gaza (*Kompas*, 08/01/2009).

Berbagai macam kantong-kantong kekerasan dan perang global di beberapa belahan dunia juga menyeras anak-anak kita terlibat dalam doktrinasi kekerasan. Cara pandang menghalalkan kekerasan telah disuntikan pada benak dan perasaan anak-anak itu. Perang dan imperialisme telah menjauhkan anak-anak dari perhatian orang tua atau orang dekat yang dapat mengasihinya.

Gambaran kekejaman orang tua yang mengajari anak-anak untuk membenci dan memusuhi kelompok lain semacam itu adalah racun bagi anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak adalah milik dunia dan mereka harus tumbuh menjadi sosok yang punya kesadaran universal tentang manusia dan hubungan-hubungannya. Anak-anak harus kita cegah untuk membenci, tetapi harus diajari untuk mencintai dan terlibat dalam peran yang produktif bagi pembangunan peradaban.

Pertama-pertama yang harus kita cegah adalah perang dan konflik, serta penyebab dari konflik itu harus kita pahami dan kita atasi bersama. Kita menyerang penjajahan dan perampasan hak, tetapi kita juga harus mencegah reaksi yang bermakna dendam bagi anak-anak. Setiap tindakan yang merampas hak-hak anak dan melukai anak, harus kita kutuk. Hal yang lebih penting kita harus membukakan mata dari cara pandang stau pihak yang penuh doktrin untuk mendukung kepentingan yang sempit.

Kondisi semacam itulah yang harus kita hindari. Jalan utama mengembalikan anak pada dunia sejatinya adalah memberikan mereka kesejahteraan, jangan biarkan mereka terjun ke medan tempur dengan dibekali senjata dan indoktrinasi ideologi sempit. Juga, jangan biarkan anak-anak terjun ke jalan-jalan menjadi pengemis, gelandangan, pencuri, dan penjahat. Anak-anak yang jahat lahir dari situasi ekonomi yang jahat pula.

Anak-anak harus kita selamatkan. Ketika manusia lahir, mereka bersih, suci dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi manusia yang nantinya akan berguna bagi peradaban. Manusia yang berguna tentunya adalah yang produktif, kreatif, dan kritis dalam menghadapi realitas, bukannya manusia yang hanya meniru pasif konsumtif, dan memiliki kesadaran yang rendah terhadap lingkungannya.

Oleh karena itulah, pendidikan karakter anak dalam makna makro adalah menciptakan ruang-ruang waktu yang

kondusif bagi perkembangan anak. Kita harus mencegah kekerasan terhadap anak dalam makna material-ekonomis dan sekaligus ideologi yang berupa internalisasi pemahaman dan makna yang telah tentang kehidupan. Benar bahwa bukan hanya Perguruan Tinggi saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak (didik), melainkan juga keluarga, dan bahkan sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi kita negara ketidakmampuan negara dan sistem ekonomi dalam memberikan hak-hak material (gizi, nutrisi, perumahan, dan fasilitas kehidupan) dan ideologis (melalui pendidikan) harus kita pandang sebagai kekerasan terhadap anak dan sekaligus mengingkari hak asasi manusia (HAM).

4) Pendidikan Karakter di Indonesia

Di Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan Karakter dicanangkan oleh pemerinthan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pada 2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional harus didukung secara serius. Akan tetapi, kita juga masih belum tahu bagaimana keseriusan pemerintah untuk melakukan kebijakan pendidikan nasional untuk mendukung program itu.

Tentunya, karakter bangsa hanya semata dapat dibentuk dari program pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Akan tetapi, kalau memang pendidikan bermaksud serius untuk membentuk karakter generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, butuh kesadaran terhadap para pendidik dan pelaksana kebijakan pendidikan.

Jika pendidikan dipahami dalam arti luas, sebagai proses kesadaran, pencerdasan, dan pembangunan mental dan karakter, tentu bukan hanya identik dengan Perguruan Tinggi, akan tetapi, ia berkaitan dengan proses kebudayaan secara umum yang sedang berjalan, yang punya kemampuan untuk mengarahkan kesadaran, memasok informasi, membentuk cara pandang, dan membangun karakter generasi muda khususnya. Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan siswa, remaja, dan kaum muda secara umum hanya sedikit sekali dibentuk dalam ruang kelas atau Perguruan Tinggi, tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang juga tak dapat dilepaskan dari proses bentukan ideologi dari tatanan material ekonomi yang sedang berjalan.

Jadi, tak terbantahkan jika karakter bangsa, terutama kaum mudanya, dibentuk melalui proses sejarah yang mematerialkan kesadaran, watak, cara pandang, dan mental melalui media-media yang ada, lembaga-lembaga sosial budaya,

dan bahkan punya watak yang sangat politis karena memaksakan kepentingan sebuah kekuatan yang membentuk karakter.

Upaya melacak pendidikan karakter dalam sejarah di Indonesia tampaknya akan memperoleh kesulitan dihadapkan dengan fakta bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam kelompok sosial yang berusaha memaksakan konsep pembangunan karakternya melalui kekuasaan negara. Belum lagi juga yang dibungkus nuansa suku, ras, dan agama yang banyak sekali jumlahnya. Problem negara besar yang dan agama yang banyak sekali jumlahnya. Problem negara besar yang terdiri dari banyak kelompok sosial adalah sulitnya mencari karakter apa yang mendefinisikan bangsa dan negaranya. Tidak pernah ada pengentalan watak dalam tubuh bangsa ini karena belum pernah ada penghancuran terhadap fase masyarakat lama yang feodal singkatnya belum pernah ada revolusi. Sebagai negara terjajah, karakter yang terbentuk juga mengalami pengerdilan. Namun setidaknya, sejarah telah menunjukkan adanya upaya pembangunan karakter (*character buliding*) yang kuat untuk menuntaskan proses pembangunan nasional (*character nation building*).

Perubahan yang terjadi dalam pandangan mengenai pendidikan karakter dapat ditelaah dengan teori Transformasi, dari tulisan Amitai Etzioni dalam buku himpunan bunga rampai yang berjudul “*Social Change*”. Teori transformasi dalam

tulisannya yang diberi judul “*Toward a Theory of Societal Guidance*” (Etzioni,1978:154-155). Etzioni mengaitkan teori ini dengan tipologi masyarakat. Secara garis besar, dia membagi tipologi masyarakat menjadi dua, yakni masyarakat pasif dan lainnya masyarakat aktif. Dia menjelaskan karaktersitik dua tipe masyarakat tersebut. Dia menggunakan dua dimensi yang menjadi karakter utama masyarakat. Dua dimensi itu adalah kontrol dan konsensus. Ada masyarakat yang tingkat kontrol dan konsensusnya tinggi; ada masyarakat yang kontrol dan konsensusnya rendah. Masyarakat yang kontrol dan konsensusnya mencapai tingkat tinggi masuk ke dalam masyarakat aktif; dan jika kontrol dan konsensusnya rendah merupakan masyarakat pasif.

BAB II

KONSEP DASAR PENDIDIKAN

KARAKTER

A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila meliputi: (1) Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati baik, berpikiran baik, dan perilaku baik. (2) Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila. (3) Mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia (Kemendiknas, 2011:7). Dalam konteks pendidikan karakter, kemampuan yang harus dikembangkan melalui Perguruan Tinggi

adalah berbagai kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban amanah sebagai pemimpin di dunia. Selain itu, pendidikan karakter harus diarahkan pada pembentukan watak.

Pendidikan karakter secara rinci memiliki lima (5) tujuan. Pertama, mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai universal karakter bangsa. Kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. Sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, kebangsaan. Kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan Perguruan Tinggi sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, persahabatan, dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Zubaedi, 2011:18).

Selain itu, pendidikan karakter memiliki tiga (3) fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik agar berpikiran baik,

berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsalain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Ketiga fungsi ini dilakukan melalui; (1) pengukuhan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, (2) pengukuhan nilai dan norma konstitusional UUD 45, (3) penguatan komitmen kebangsaan negara keatuan Republik Indonesia (NKRI), (4) penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhineka Tunggal Ika, dan (5) penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia dalam konteks global.

Menurut Dony Kusuma (2007:12), pendidikan karakter merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan

internalisasi nilai-nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif, stabil dalam diri individu. Dinamika ini membuat pertumbuhan individu menjadi semakin utuh. Unsur-unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi setiap individu. Pendidikan karakter sebagai sebuah program kurikuler telah dipraktekkan di sejumlah negara. Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru, yang mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Sehingga dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dari sisi substansi dan tujuannya sama dengan pendidikan budi pekerti, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan secara mendasar, karena membawa perubahan individu sampai ke akar-akarnya.

B. Dasar Hukum Pendidikan Karakter

Berikut ini adalah dasar hukum sebagai landasan kebijakan pendidikan karakter menurut Jamal M (2011: 41), antara lain:

1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas No. 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan
5. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
6. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014
8. Renstra Kemendiknas Tahun 2010 – 2014
9. Renstra Direktorat Pembinaan SMP tahun 2010 – 2014

BAB III

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS NASIONALISME

A. Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi

Pendidikan karakter semestinya mempunyai tujuan jangka panjang yang didasarkan pada tantangan aktif kontekstual individu atas impuls natural social yang diterimanya. Berdasarkan tujuan jangka panjang, individu dapat semakin memahami visi hidup yang akan dicapai lewat proses pembentukan diri terus-menerus. Tujuan jangka panjang tidak sekadar berupa idealisme penentuan sarana untuk mencapai tujuan, tetapi sebuah cara pandang dialektis yang semakin mendekatkan antara yang ideal dan kenyataan melalui proses refleksi dan intreraksi terus-menerus antara idealisme, pilihan sarana, dan hasil langsung yang dapat dievaluasi secara objektif.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan karakter bangsa ada empat, yaitu berkelanjutan; melalui semua mata pelajaran atau kuliah, pengembangan diri, dan budaya kampus; nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan; dan proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan (Kemendiknas 2010:11-14). Sedangkan menurut

Hidayatullah (2010:36), strategi dalam pendidikan karakter ada lima, yaitu keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, dan integrasi dan internalisasi.

Diawali dengan pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, Perguruan Tinggi, dan tugas-tugas di luar Perguruan Tinggi.

Strategi dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kelas dan Perguruan Tinggi mencakup lima langkah. Kelima langkah tersebut adalah 1) menciptakan iklim yang mendukung terciptanya perilaku moral dan prestasi tinggi, 2) membina keterampilan etis, 3) gunakan pendekatan magang untuk melatih siswa dalam mempraktekkan nilai, 4) pemeliharaan swa-regulasi keterampilan, dan 5) struktur dukungan dalam membangun karakter dengan masyarakat (Narvaez dan Lapsley 2010:113).

Pendidikan karakter memberikan tiga matra penting dalam setiap tindakan edukatif dan campur tangan intensional bagi sebuah kemajuan pendidikan. Ketiga matra pendidikan karakter itu adalah individu, sosial, dan moral (Koesoema 2007:143). Adanya hubungan yang negatif antara masyarakat dan individu. Secara kodrat manusia itu baik, namun masyarakatlah yang membelenggu individu sehingga tumbuh semakin menjauh dari kodratnya. Agar manusia tumbuh sesuai kodratnya, pendidikan mestinya melepaskan belenggu social dan membiarkan alam berkembang menjadi guru.

Menurut Masrukhi (2009:108), faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan karakter ada enam, yaitu guru, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, kepemimpinan kepala Perguruan Tinggi, dan kultur Perguruan Tinggi. Kualitas proses pembelajaran di Perguruan Tinggi sangat bergantung oleh kualitas gurunya (Harras 1994 dan Sarwiji 1996). Bahan ajar memegang peran yang penting terhadap informasi yang diperoleh pembaca. Media mempunyai peran yang penting dalam pembelajaran yang tidak dapat tidak pasti ada. Metode pembelajaran yang digunakan guru akan berpengaruh terhadap suasana komunikasi dalam pembelajaranyang merupakan tingkat penerapan teori-teori yang ada pada tingkat pendekatan. Sebagai atasan langsung guru, kepemimpinan kepala Perguruan Tinggi

akan mempengaruhi suasana kerja guru. Kultur Perguruan Tinggi mempunyai peran yang penting dalam pembangunan karakter.

Nilai yang perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam pendidikan diutarakan oleh Megawangi, Koesoema, Sulhan, Kemdiknas, dan Hidayatullah. Menurut Megawangi (2004:95), nilai-nilai karakter yang bersifat umum yang perlu ditanamkan ada sembilan pilar, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kemandirian dan tanggung jawab; kejujuran (amanah) dan bijaksana; hormat dan santun; dermawan, suka menolong, dan gotong royong; percaya diri, kreatif, dan pekerja keras; kepemimpinan dan keadilan; baik dan rendah hati; toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada delapan, yaitu keutamaan, keindahan, kerja, cinta tanah air, demokrasi, kesatuan, nilai moral, kemanusiaan (Dony Koesoema, 2010:208-211). Menurut Sulhan (2010:13-15), nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari karakter nabi Muhammad yang dapat diterapkan adalah benar, ikhlas, jujur, sabar (*sidiq*); adil, istikomah, berbakti kepada orang tua, waspada, hormat (*amanah*), lemah lembut, kebersihan, empati, rendah hati, sopan santun, tanggung jawab (*tabligh*); disiplin, rajin bekerja, gigih, logis dalam berpikir, ingin berprestasi, kreatif, teliti, dan bekerjasama (*fathanah*).

Dalam Buku Pedoman Perguruan Tinggi (Kemdiknas 2010:23), nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pendidikan

budaya dan karakter ada delapan belas, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Menurut Hidayatullah (2010:79-89), butir-butir karakter ada enam puluh sembilan. Keenam puluh sembilan butir-butir tersebut adalah adil, amanah, pengampunan, antisipatif, arif, baik sangka, kebajikan, keberanian, bijaksana, cekatan, cerdas, cerdik, cermat, pendaya guna, demokratis, dermawan, dinamis, disiplin, efisien, empan papan, empati, *fair play*, gigih, gotong-royong, hemat, hormat, kehormatan, ikhlas, inisiatif, inovatif, kejujuran, pengendalian diri, kooperatif, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, kemurahan hati, *pakewuh*, peduli, penuh perhatian, produktif, rajin, ramah, sabar, saleh, santun, setia, sopan, susila, ketaatan, tabah, tangguh, tanggap, tanggung jawab, bertaqwa, tegar, tegas, tekad (komitmen), tekun, tertib, ketertiban, tahu berterima kasih, trengginas, ketulusan, tepat waktu, toleransi, ulet, berwawasan jauh ke depan.

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter didasarkan pada indikator (Kemendiknas 2010:14). Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari,

atau dirasakan” maka guru mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya. Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru berada di kelas atau di Perguruan Tinggi (Koesoema 2010:43).

Model anecdotal record (catatan yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai contoh, peserta didik diminta menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan bantuan terhadap orang kikir, atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial sampai kepada hal yang dapat mengundang konflik pada dirinya.

Pengembangan karakter bukan saja menjadi kebutuhan bangsa Indonesia yang secara faktual masih berusia muda, negara seperti Amerika Serikat pun yang telah memiliki pengalaman hidup bernegara bangsa (*nation state*) ratusan lamanya tidak luput dari upaya ini. Kebutuhan akan pendidikan karakter dirasakan Amerika Serikat pada saat ini memasuki abad ke-21 dan merasakan terjadinya krisis moral nilai-nilai yang mencemaskan, karena beberapa alasan mendasar sebagai berikut (Lickona, 1991: 74):

- a. Adanya kebutuhan nyata dan mendesak (*there is a clear and urgent need*)
- b. Proses tranmisi nilai sebagai proses peradaban (*transmitting values is adn always has been the work of civilisation*)
- c. Peranan satuan pendidikan sebagai moral yang vital pada saat melemahnya pendidikan nilai dalam masyarakat (*the school's role as moral educator becomes more vital at a time when milions of children get little moral teaching from their parent and when value centered influence such as chusrch or temple are also absent from their lives*).
- d. Tetap adanya kode etik dalam masyarakat yang sarat konflik nilai (*there is common ethical ground even in our values conflicted society*)
- e. Kebutuhan demokrasi akan pendidikan moral (*democracies have a special need for moral education*)
- f. Kenyataan yang sesungguhnya bahwa tidak ada pendidikan yang bebas nilai (*there is no such thing as value free education*)
- g. Persoalan moral sebagai salah satu persoalan dalam kehidupan (*moral questions are among the great question facing both the individual and human race*)
- h. Adanya landasan yang kuat dan dukungan luas terhadap pendidikan moral di satuan pendidikan (*there is a broad based, growing support for values education in the schools*).

Pembangunan karakter melalui Pendidikan dijadikan salah satu solusi terbaik agar tantangan masa depan dapat terjawab, sehingga kebijakan implementasi pendidikan yang berbasis karakter dijadikan sebagai kekuatan bangsa. Pendidikan formal melalui Perguruan Tinggi dijadikan dasar pijakan sebagaimana keselarasan dalam fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yaitu “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab”. (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/ UUSPN).

Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kebudayaan adiluhung. Masyarakatnya hidup rukun, ingat semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang diambil dari sesanti pada zaman Majapahit “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa” menunjukkan hidup penuh toleransi antar warga negara yang berbeda-beda. Hubungan sosial dihiasi perilaku sopan dan santun, saling menghargai, dan tenggang rasa.

Pendidikan masih dipandang sebagai cara untuk membuat manusia menjadi lebih baik, bijak, dan pendidikan menghasilkan manusia-manusia yang mendukung berjalanya masyarakat yang ideal. Namun, tampaknya tetap ada sebagian orang yang merasa tak puas terhadap dunia pendidikan, baik akses, proses, maupun hasilnya. Bahkan pandangan itu memunculkan pandangan pesimis terhadap Perguruan Tinggi, Ivan Illich, misalnya, adalah pemikir humanis radikal yang dalam bukunya *Deschooling Society* (Masyarakat Tanpa Perguruan Tinggi) menolak Perguruan Tinggi formal yang menurutnya memasung kebebasan dan perkembangan manusia. Perguruan Tinggi dianggapnya sama sekali tak memadai bagi perkembangan anak-anak dan kaum muda, mereka sering mengejek keberadaan Perguruan Tinggi, yang dianggapnya ingin jadi satu-satunya malaikat yang ingin membentuk generasi bangsa dan ingin menyelamatkan anak-anak muda dari ancaman dari kejahatan-kejahatan moral.

Pembentukan pola tingkah laku seseorang sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Kekerasan yang terjadi di dalam dunia pendidikan harus dihindari karena akan melahirkan situasi lingkungan yang menghambat proses pembelajaran. Akan tetapi, hal itu ternyata masih sering terjadi di dunia pendidikan kita. Dampak kekerasan sangat luar biasa baik kita sadari atau tidak. Lingkungan yang keras, dengan tindakan orang lain yang terlalu

kasar, adalah bentuk rangsangan dari luar diri yang membuat kita kaget, tidak mampu merespons secara pelan dan memunculkan pemahaman. Misalnya, ketika ada perkataan kasar dan menyakiti pun sekaligus serangan kekerasan pada kita, kita tak sempat berfikir untuk menjelaskannya, tetapi meresponya secara cepat. Itulah yang membuat kita yakin bahwa kekerasan itu dalam banyak hal menghambat pertumbuhan mental secara sehat.

Ada beberapa bentuk kekerasan yang dapat kita pahami dan sekaligus petakan ketika berbicara tentang kekerasan di dunia pendidikan. *Pertama*, kekerasan antara peserta didik. Hal ini bisa terjadi di dalam lembaga pendidikan yang sama. Misalnya kasus kekerasan yang sering dikenal dengan istilah *bullying*. Ada juga kekerasan yang terjadi antar peserta didik yang berbeda Perguruan Tinggi atau kampus, misalnya tawuran pelajar antar Perguruan Tinggi dan kampus yang sering terjadi. Kasus *School Bullying* merupakan bentuk kekerasan yang sering mendapatkan perhatian dari para pengamat. *School Bullying* didefinisikan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang/ sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa/ siswi lain yang lebih lemah. Dengan tujuan menyakiti orang tersebut, mereka kemudian mengelompokkan perilaku *bullying* ke dalam lima kategori berikut sebagaimana dikemukakan oleh (Fatchul Mu'in, 2011: 54):

1. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, mengigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk meremas dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain)
2. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (*name calling*), sarkasme, merendahkan (*put down*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).
3. Perilaku nonverbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam: biasanya disertai oleh *bullying* fisik atau verbal).
4. Perilaku nonverbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).
5. Pelecehan seksual (Kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

Kedua Kekerasan dalam bentuk perpeloncoan yang biasanya terjadi karena hubungan senioritas-junioritas. Hal ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa/ pelajar dalam masa

orientasi mahasiswa/ pelajar yang baru masuk. Bentuk perpeloncoan semacam ini awalnya dipandang sebagai latihan kepemimpinan dan latihan mental yang dianggap sebagai hak para senior untuk memperlakukan juniornya. Akan tetapi, model-model semacam ini belakangan banyak dikritik karena seiring menimbulkan efek yang membahayakan, misalnya ada yang meninggal dunia karena perpeloncoan dengan cara kekerasan fisik yang keterlaluan.

Kegiatan ini juga dipandang hanya menonjolkan tindakan balas dendam para senior yang dulunya juga pernah diperlakukan yang sama saat mereka masih junior juga. Meskipun banyak kritik muncul, tradisi perpeloncoan semacam ini belum sepenuhnya hilang dari lembaga lembaga pendidikan. *Ketiga*, Kekerasan pendidik terhadap peserta didik (muridnya). Kekerasan dalam hal ini dapat kita bagi menjadi : (a). kekerasan fisik dan (b) kekerasan non-fisik atau kekerasan psikologis. Kekerasan fisik yang dilakukan guru merupakan tindakan yang biasa sejak munculnya Perguruan Tinggi: pemukulan, menjewer, mencubit, menendang, hingga yang menggunakan alat bantu, seperti tongkat untuk membaca di papan tulis, pengaris kayu. Kekerasan oleh guru yang keterlaluan juga sering direaksi oleh anak-anak didik dengan kekerasan. Bentuk kekerasan non-fisik sebenarnya secara tidak disadari (karena kejadian dan dampaknya tidak tampak) membawa pengaruh yang luar biasa yang terjadi pada peserta

didik. Kekerasan ini justru menimbulkan dampak psikologis yang laten karena tak tampak dianggap tidak menjadi masalah. Contoh dampak psikologis dari kekerasan non-fisik, misalnya terancamnya eksistensi dan pertumbuhan anak-anak kita. Situasi pendidikan (di dalam Perguruan Tinggi, kampus, kelas) dan tindakan-tindakan para penghuni lembaga pendidikan (terutama para guru/ pendidik) yang menimbulkan tekanan bagi mereka yang belajar merupakan kekerasan psikologis yang secara nyata beroperasi, akan tetapi guru tidak menyadari dampak yang ada.

Namun, ada kekerasan psikologis yang umumnya bisa kita lihat dari tindakan dan perkataan para guru, misalnya bagaimana mereka membuat pelajar tidak mampu menerima pelajaran yang baik, bahkan juga tindakan-tindakan atau kata-kata yang mengancam dan mendegradasikan kejiwaan siswa. Jadi, contoh-contoh kekerasan psikologis ini antara lain meliputi pemberian tugas berlebihan, memberikan target prestasi terlalu tinggi, dan memaksa anak melakukan sesuatu di luar minatnya. Guru maupun orang tua sering memiliki sejumlah ambisi pribadi yang dibebankan di pundak anak. Mereka selalu berdalih demi masa depan anak. Mereka menganggap anak sebagai benda mati yang masa depannya harus ditentukan guru dan orang tua.

Anak yang punya karakteristik berbeda-beda dipaksa untuk memiliki kemampuan yang sama. Lewat Ujian Nasional

(UNAS) mereka dipaksa memiliki kemampuan yang memadai dalam beberapa mata pelajaran. Kasus ini banyak terjadi. Karena itu, sudah saatnya kita mengevaluasi diri. Perlu didasari, kekerasan seperti itu, terkadang bahkan sering tidak disertai niat jahat. Sebaliknya, tindakan itu malah berselimut niat baik. Karena itu, pada umumnya mereka yang melakukan kekerasan pada anak sama sekali tidak merasa bersalah. Mereka merasa bahwa dirinya telah berbuat kebaikan, merasa memberikan yang terbaik kepada anak.

Pendidikan senantiasa diletakkan dalam kerangka dan tugas yang ditujukan bagi sebuah generasi yang sedang ada dalam masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu, pendidikan mengarahkan dirinya pada pembentukan kepribadian individu. Proses pembentukan diri terus menerus ini terjadi dalam kerangka ruang dan waktu. Dengan demikian pendidikan mengacu pada setiap bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasi, terus menerus, tertata rapi, dan terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untuk membentuk kepribadian secara personal dan sosial. Pendidikan juga merupakan fenomena antropologis yang usianya hampir setara dengan sejarah manusia itu sendiri.

Pendidikan adalah proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus, hal ini terjadi karena secara kodrat manusia memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan. Namun

intervensi manusia terhadap pendidikan sebagai bagian dari usaha melengkapi kekurangan dari sebuah kondisi yang membutuhkan suatu perbaikan. Lebih jauh lagi kini antar anak bangsa saja sudah saling curiga mencurigai, misalnya dengan yang berbeda etnis, agama, dan kelas sosial. Dan yang paling mengerikan adalah maraknya tawuran antar pelajar yang hanya disebabkan oleh persoalan yang sepele, dari aspek pendidikan masalah ini tidaklah adil jika yang dipersalahkan hanya guru ataupun siswa saja. Dan kemudian kita mendeskreditkan pelajaran agama Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan yang paling punya tanggung jawab. Jawaban semacam ini tidaklah tepat, harus ada sinergitas dalam upaya menanamkan karakter yang bukan saja tugas dari dua mata ajar tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan di setiap negara ditujukan untuk mendukung kehidupan demokrasi yang konstitusional. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa: “Kurikulum Pendidikan wajib memuat: Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa”. Tiga mata pelajaran tersebut mensyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan manusia Indonesia yang religius, bangsa yang menghargai warga negaranya, dan identitas kebangsaan dengan bahasa nasionalnya. Sehingga pada ketentuan pasal ini menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan strategis selain Pendidikan Agama dan Bahasa. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk pada kurikulum di setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dari Perguruan Tinggi dasar hingga pendidikan tinggi.

Pendidikan Kewarganegaraan di negara lain, seperti Amerika Serikat dikenal dengan istilah *Civics* atau *Civics Education*, sedangkan di Inggris dikenal dengan istilah *Citizenship Education*, di Timur Tengah dikenal dengan istilah *Ta'limatul Muwwatanah*, di Jerman dikenal dengan istilah *Sachunterricht*. Di Australia dikenal dengan istilah *Civics atau Social Studies*, sedangkan di Afrika Selatan dikenal dengan istilah *Life Orientation*. Di Hongaria dikenal dengan istilah *People and Society*. Sedangkan di Singapura dikenal dengan istilah *Civics and Moral Education* (Udin.S. Winataputra, 2006: 3).

Partisipasi warga negara dapat ditumbuhkan secara langsung sebagai dampak dari adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, partisipasi tersebut dapat menentukan kualitas penentuan keputusan publik, dengan mengutamakan nilai nilai moral yang baik. Tujuan tersebut berlawanan dengan adanya fenomena yang terjadi pada saat ini, seperti merosotnya nilai – nilai moral yang terjadi dalam masyarakat atau biasa disebut dengan *Degradasi Moral*.

Hal ini sejalan dengan amanah Mahatma Ghandi (dalam Soedarsono, 2010:32) mengurai sebagai ‘tujuh dosa yang mematikan’ (*the seven deadly sins*) yaitu: (1) semakin merebaknya nilai-nilai dan perilaku memperoleh kekayaan tanpa bekerja (*wealth without work*), (2) kesenangan tanpa hati nurani (*pleasure without conscience*), (3) pengetahuan tanpa karakter (*knowledge without character*), (4) bisnis tanpa moralitas (*commerce without ethic*), (5) ilmu pengetahuan tanpa kemauan (*science without humanity*), (6) agama tanpa pengorbanan (*religion without sacrifice*); dan (7) politik tanpa prinsip (*politic without principle*).

Sejalan dengan perkembangan perubahan Kurikulum, maka dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, menjadi semangat baru bagi eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan yang kembali berubah nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Perubahan tersebut juga menjawab salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini, Pertanyaan yang muncul adalah “apa yang salah dengan bangsa kita ini?” Kondisi yang demikian itu merupakan indikasi hilangnya karakter yang akan mengarah pada kehilangan segalanya. Oleh karena itu, perlu disadari oleh seluruh pemangku kepentingan (*stake-holder*) termasuk seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian yang cukup signifikan untuk memulai kembali membangun karakter bangsa.

Potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah (2011:18) menyebutkan bahwa “Pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia”. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Bahkan Stiles (Hidayatullah, 2011:19) menyatakan bahwa “Pembangunan karakter tidak dapat dilakukan dengan serta merta tanpa upaya sistematis dan terprogram sejak dini”.

Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Secara *psikologis* dan *socio-cultural*, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (*kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik*) dalam konteks interaksi social kultural (dalam keluarga, satuan

pendidikan, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses *psikologis* dan *socio-cultural* tersebut dapat dikelompokkan dalam olah hati (*spiritual and emotional development*), olah pikir (*intellectual development*), olah raga dan kinestetik (*physical and kinesthetic development*), dan olah rasa dan karsa (*affective and creativity development*) (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010). Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan/ keimanan menghasilkan karakter jujur dan bertanggung jawab.

Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif menghasilkan pribadi cerdas. Olah raga berkenaan dengan proses persepsi, kesiapan, peniruan, manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas menghasilkan sikap bersih, sehat, dan menarik. Olah rasa dan karsa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan menghasilkan kepedulian dan kreatifitas.

Dalam konteks suatu bangsa, karakter dimaknai sebagai nilai-nilai keutamaan yang melekat pada setiap individu warga negara dan kemudian menjejawantah sebagai personalitas dan identitas kolektif bangsa (PP Muhammadiyah, 2009:2). Karakter berfungsi sebagai kekuatan mental dan etik yang mendorong suatu bangsa merealisasikan cita-cita kebangsaannya dan

menampilkan keunggulan-keunggulan komparatif, kompetitif, dan dinamis di antara bangsa-bangsa lain. Karena itu, dalam pemaknaan demikian, manusia Indonesia yang berkarakter kuat adalah manusia yang memiliki sifat-sifat: religius, moderat, cerdas, dan mandiri. Sifat religius dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian taat beribadah, jujur, terpercaya, dermawan, saling tolong menolong, dan toleran.

Sifat moderat dicirikan oleh sikap hidup yang tidak radikal dan tercermin dalam kepribadian dan sosial, berorientasi materi dan rohani, serta mampu hidup dan kerjasama dalam kemajemukan. Sifat cerdas dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian yang rasional, cinta ilmu, terbuka, dan berpikiran maju. Dan sikap mandiri dicirikan oleh sikap hidup dan kepribadian merdeka, disiplin tinggi, hemat, menghargai waktu, ulet, wirausaha, kerja keras, dan memiliki cinta kebangsaan yang tinggi tanpa kehilangan orientasi nilai-nilai kemanusiaan universal dan hubungan antar peradaban bangsa-bangsa.

Salah satu dampak nyata dalam konteks kehidupan bermasyarakat dari permasalahan adalah bergesernya orientasi nilai yang diyakini seseorang, dan cara pandangya terhadap keberhasilan hidup. Orientasi nilai idealis yang mengedepankan akhlak, etika, moral, budi pekerti, dan harga diri sering kali tergeser. Muncullah kecenderungan orientasi nilai dalam kehidupan kini yang bergeser menjadi hedonis yang berorientasi

kepada materi dan lebih bersifat duniawi, orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuan yang menjadi orientasi kehidupannya.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini , telah membawa perubahan besar diberbagai sektor kehidupan manusia. Hal itu berdampak pada pergeseran nilai dan perilaku kehidupan masyarakat. Gelombang arus informasi yang sangat dasyat dalam dunia maya dalam hal ini adalah penggunaan internet serta pemberitaan media massa yang bebas dan cenderung tidak tersaring dengan baik, telah membawa dampak terhadap perilaku hidup seseorang. Berdasarkan indikasi tersebut, globalisasi membawa perubahan pola berpikir dan bertindak masyarakat bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang cenderung terpengaruh nilai – nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.

Dengan adanya pendidikan karakter, perlu diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan Perguruan Tinggi. Lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi dipandang sebagai tempat yang strategis untuk membentuk karakter. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya mencerminkan karakter yang baik dan kuat (Muhammad Furqon, 2010: 3). Pemahaman serta internalisasi pendidikan karakter secara komprehensif dapat dilakukan untuk menyaring kebudayaan asing yang dapat

merusak moral generasi penerus bangsa. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus dapat menjadi penghubung yang baik dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pendidikan karakter.

Untuk membangun karakter bangsa Indonesia pemerintah sudah berupaya melalui sosialisasi Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. menurut Kaelan (2011:33) seyogyanya didasarkan pada dasar filosofis bangsa. Bangsa Indonesia telah menentukan jalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada suatu 'khitoh' kenegaraan, *filosofischegrondslag* atau dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Karena itu, etika politik kenegaraan sebagai prasyarat membentuk karakter bangsa perlu disandarkan pada nilai-nilai dasar Pancasila. Sebab sebagai dasar negara, *filosofischegrondslag*, Pancasila bukan merupakan suatu preferensi, melainkan sudah merupakan suatu realitas objektif bangsa dan negara Indonesia, yang memiliki dasar legitimasi yuridis, filosofis, politis, historis dan kultural.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan *grand design* pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis satuan pendidikan. *Grand design* menjadi rujukan konseptual dan operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang pendidikan. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan

sosial-kultural tersebut dikelompokkan dalam: Olah Hati (*Spiritual and emotional development*), Olah Pikir (*intellectual development*), Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*). Pengembangan dan implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan mengacu pada *grand design* tersebut.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 Ayat 1 menyebutkan bahwa: “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Berdasarkan observasi pada studi pendahuluan di Perguruan Tinggi (Nopember,2012) ditemukan data sebagai berikut: Peserta didik mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi hanya sekitar 7 jam per hari, atau kurang dari 30%. Selebihnya (70%), peserta didik berada dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Jika dilihat dari aspek kuantitas waktu, pendidikan di Perguruan Tinggi berkontribusi hanya sebesar 30% terhadap hasil pendidikan peserta didik.

Pendidikan menjadi garda depan dalam upaya pembentukan karakter manusia Indonesia yang sesungguhnya.

Penyelenggaraan pendidikan karakter pada konteks mikro, difokuskan pada Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi merupakan sektor utama yang secara optimal memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk menginisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di Perguruan Tinggi. Pengembangan karakter di Perguruan Tinggi dibagi dalam empat pilar yaitu belajar mengajar di kelas; keseharian dalam bentuk pengembangan budaya Perguruan Tinggi; ko - kurikuler dan atau ekstra kurikuler; serta keseharian di rumah dan masyarakat. (Endah Sulistyowati, 2012 :11 dalam Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010 – 2025).

Pendidikan karakter juga berkembang pesat di belahan dunia, salah satunya program yang dilaksanakan dalam Program Pendidikan Nilai – Nilai Hidup (*Living Values Education Programme/ LVEP*). Program ini diawali oleh PBB pada saat berulang tahun ke- 50 yang diawali dengan adanya proyek internasional yaitu *Sharing Our Values for a Better World* (Berbagi Nilai – Nilai demi sebuah dunia yang lebih baik). Program ini diawali oleh salah satu institut Brahma Kumaris pada tahun 1995. (Tillman, 2001: 67).

Maka usaha pendidikan karakter sungguh – sungguh sangat diperlukan dewasa ini. Karena pendidikan karakter dapat menahan kemerosotan karakter dalam kehidupan sekarang, dan

mendatang. Menurut filsafat manusia, hakikat manusia ada tiga, yaitu ; (1). Manusia sebagai makhluk moral, yaitu berbuat sesuai dengan norma – norma susila; (2). Manusia sebagai makhluk individual, yaitu berbuat untuk kepentingan diri sendiri; (3) manusia sebagai makhluk sosial, hidup bermasyarakat, bekerjasama,dan tolong menolong. Ketiga hakikat manusia itu terus berkembang dan mendapat bimbingan dan pengarahan yang benar semenjak kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut (Mohamad Mustari, 2011: 12).

Sebagaimana telah dikaji diatas bahwa moral, etika, dan karakter merupakan istilah yang sepadan, yang menggambarkan nilai – nilai yang diyakini seseorang untuk diwujudkan dalam kaitanya dengan tanggungjawab sosial. Sejalan dengan itu, masalah moral, pembelajaran moral atau karakter moral saat ini juga menjadi bahan perbincangan pada masa sekarang terutama dikaitkan dengan kualitas karakter moral manusia di era reformasi saat ini. Tingkatan kualitas karakter moral manusia Indonesia, selain menghadapi masalah rancunya atau anomali nilai moral yang terjadi dalam masyarakat, juga diduga tengah menuju pada tataran yang paling rendah dalam kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan sempat pula dipertanyakan , apakah masih ada moral (yang baik) pada bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia ini? Sekarang nilai moral sudah diputarbalikkan untuk memenuhi kepentingan pribadi,

kepentingan kelompok, dan kepentingan kekuasaan sesaat, dan kepentingan itu, tidak ada ujung pangkalnya.

Di sinilah muara tumbuhnya kerancuan nilai moral, pada gilirannya memuntahkan dilema moral yang terjadi di masyarakat, khususnya terhadap generasi muda yang sedang tumbuh, berkembang, dan mencari jawaban moral dalam kehidupannya. Dalam menghadapi kerancuan nilai moral tersebut juga melahirkan dilema moral yang berpengaruh terhadap kebiasaan yang bersifat Konvensional. Menurut Hartsthorne dan May dalam Sarbaini (2011: 2) menyatakan bahwa “Dalam pendidikan karakter moral, maka prinsip – prinsip yang diajarkan dengan cara memberi contoh, menasehati, memberi hadiah dan memberi hukuman adalah tidak efektif untuk menghasilkan tingkah laku moral yang dikehendaki”. Dengan kata lain bahwa metode Konvensional dalam pendidikan karakter moral warga negara (*civics virtue*) , tidak memadai lagi, maka diperlukan suplemen metode agar pendidikan karakter moral warga negara (*civics virtue*) menjadi lebih efektif.

Jawaban terhadap permasalahan pendidikan karakter moral warga negara (*civics virtue*) sekarang salah satunya dikerucutkan pada karya Jean Piaget dan Lawrence Kohlberg. Penemuan – penemuan mereka menunjang keyakinan bahwa pertimbangan moral berkembang dengan melalui rentetan reorganisasi kognitif yang disebut tahap – tahap. Setiap tahap

mempunyai bentuk, pola dan organisasi yang dapat diidentifikasi. Tahapan tersebut merupakan suatu proses yang membutuhkan perubahan struktur kognitif dan perubahan tersebut tergantung dari perkembangan kognitif dan rangsangan dari lingkungan sosial (Duska dan Whelan, dalam Sarbaini (2011: 2).

Kurikulum tahun 2013 mengisyaratkan pengembangan kurikulum yang mampu menyisipkan pendidikan karakter sebagai upaya pembentukan karakter siswa di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu harus pula didukung oleh seluruh komponen yang ada di Perguruan Tinggi, dari kepala Perguruan Tinggi, guru, siswa, karyawan dan staff, sarana prasarana serta seluruh sistem yang mendukung pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Selain menanamkan nilai –nilai karakter kepada peserta didik, seorang guru memiliki peran untuk memberikan keteladanan yang baik yang tentunya akan meningkatkan suasana kondusif di dalam dan sekitar lingkungan Perguruan Tinggi, dan selanjutnya pendidikan karakter itu akan bisa efektif dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat John Dewey, menurut Dasim Budimansyah (2010: 47) Project Citizen merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada para peserta didik tentang langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik. Project Citizen pada dasarnya dikembangkan dari model pendekatan berpikir

kritis atau reflektif sebagaimana dirintis oleh John Dewey (1900) dengan paradigma “*How We Think*”-nya atau model “*Reflective Inquiry*”-nya Barr, dkk (1978).

B. Pendidikan Karakter Berbasis Nasionalisme

1) Hakikat Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu paham yang mengutamakan persatuan dan kebebasan bangsa. Nasionalisme memuat beberapa prinsip yaitu: kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan.

Nasionalisme dapat dipahami dari sudut pandang antropologi dan politik. Dalam dimensi antropologi, nasionalisme dipandang sebagai sistem budaya yang mencakup kesetiaan, komitmen, emosi, perasaan kepada bangsa dan negara, dan rasa memiliki bangsa dan negara itu. Dalam dimensi ini, Benedict Anderson mengatakan bahwa nation (bangsa) adalah suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan (*imagined communities*).

Komunitas politik itu dikatakan sebagai *imagined communities* sebab suatu komunitas tidak mungkin mengenal seluruh warganya, tidak mungkin saling bertemu, atau saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki gambaran atau bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa

dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan (Benedict Anderson, 1983: 15). Senada dengan Benedict Anderson, Ernest Renan mengatakan bahwa unsur utama dalam pembentukan suatu bangsa adalah le desir de'etre ensemble (keinginan untuk bersatu) (Taufik Abdullah, 2001: 49).

John Hutchinson (2000:34) menjelaskan bahwa Nasionalisme lebih merupakan sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena dia berakar pada etnisitas dan budaya postmodern. Kalaupun nasionalisme bertransformasi menjadi sebuah gerakan politik, hal tersebut bersifat superfisial karena gerakan-gerakan politik nasionalisme pada akhirnya dilandasi oleh motivasi budaya, khususnya saat terjadi krisis identitas kebudayaan.

Dalam dimensi politik, nasionalisme merupakan ideologi yang meyakini bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, yaitu suatu negara yang penduduknya memiliki hak dan kewajiban sama serta maumengikatkan dirinya dalam suatu negara (Hans Kohn, 1984: 11; J.M. Romein, 1956: 75). Demikian juga Soekarno, presiden pertama Indonesia, mengatakan bahwa bangsa adalah sebuah konstruksi yang dihasilkan oleh sebuah visi yang diperjuangkan, Dalam pengertian politik ini, prinsip-prinsip utama dalam

nasionalisme adalah kebebasan, kesatuan, keadilan, dan kepribadian yang menjadi orientasi kehidupan kolektif suatu kelompok untuk mencapai tujuan politik, yaitu negara nasional (Sartono Kartodirdjo, 1993: 3). Sebagai doktrin politik, nasionalisme merupakan basis serta pembenaran ideologis bagi setiap bangsa di dunia untuk mengorganisasi diri dalam entitas-entitas yang bebas atau otonom, dan entitas itu mengambil bentuk negara nasional yang merdeka (Michael A. Riff, 2001: 194)

Nasionalisme memiliki beberapa bentuk antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil) adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari partisipasi aktif rakyatnya. Keanggotaan suatu bangsa bersifat sukarela. Bentuk nasionalisme ini mula-mula dibangun oleh Jean-Jacques Rousseau dan menjadi bahan tulisannya.
- b. Nasionalisme etnis atau etnonasionalisme adalah dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa bersifat turun-temurun.
- c. Nasionalisme romantik adalah bentuk nasionalisme etnis dimana negara memperoleh kebenaran politik sebagai suatu yang alamiah dan merupakan ekspresi dari bangsa

- atau ras. Nasionalisme romantik menitik beratkan pada budaya etnis yang sesuai dengan idealisme romantik
- d. Nasionalisme budaya adalah nasionalisme dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-temurun seperti warna kulit
 - e. Nasionalisme kenegaraan adalah merupakan variasi nasionalisme kewarganegaraan yang sering dikombinasikan dengan nasionalisme etnis. Dalam nasionalisme kenegaraan, bangsa adalah suatu komunitas yang memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan kekuatan negara.
 - f. Nasionalisme agama adalah nasionalisme dimana negara memperoleh legitimasi politik dari persamaan agama.
- (Retno Listiarti, 2007: 28)

Dalam arti luas, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya dengan memandang bangsanya itu merupakan bagian dari bangsa lain di muka bumi ini. Nasionalisme mengandung prinsip-prinsip kebersamaan, persatuan dan kesatuan serta demokrasi.

Prinsip kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip persatuan dan

kesatuan menuntut setiap warga negara harus mampu mengesampingkan pribadi atau golongan yang dapat menimbulkan perpecahan dan anarkis (merusak), untuk menegakkan prinsip persatuan dan kesatuan setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap: kesetiakawanan sosial, peduli terhadap sesama, solidaritas dan berkeadilan sosial.

Prinsip demokrasi memandang bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, karena hakikatnya kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama mengutamakan kepentingan bangsa dan negara yang tumbuh dan berkembang dari bawah untuk bersedia hidup sebagai bangsa yang bebas, merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

2) Hakikat Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata Patriot, yang artinya adalah pecinta dan pembela tanah air, seorang pejuang sejati, pejuang bangsa yang mempunyai semangat, sikap dan perilaku cinta tanah air, dimana ia rela mengorbankan segala-galanya termasuk jiwanya demi kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran tanah air.

Suprpto dkk. (2007: 38) menyatakan bahwa patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme (Noor M

Bakry, 1994: 144). Patriotisme ialah perjuangan yang menjiwai kepada kepentingan bangsa dan Negara. Pada dasarnya patriotisme berbeda dengan nasionalisme, meskipun berbeda dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya Negara.

Konsep patriotisme seringkali disejajarkan dengan konsep nasionalisme, karena keduanya mempunyai fokus perhatian yang sama yaitu cinta tanah air dan bangsa. Istilah patriotisme sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah semangat cinta tanah air, sikap seseorang yang sudi mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya (Badudu-Zain, 2001). Menurut Sukamto (2007), sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara berbuat rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsanya serta untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menanamkan dan mengatasi serangan atau ancaman dari bangsa lain. Sikap rela berkorban demi nusa dan bangsa seperti ini bisa disebut sebagai semangat kepahlawanan. Hal ini mengacu pada sikap yang sudah diperlihatkan oleh para pahlawan bangsa yang rela mengorbankan harta, benda, jiwa dan raga dalam merebutkan kemerdekaan dari tangan penjajah

Bung Karno mengemukakan bahwa patriot bangsa dapat diidentikkan dengan pendekar atau kampiun bangsa yang di dalamnya terdapat Tri Sakti (Paharizal 2012-50), yaitu.

1. Berdaulat di bidang politik
2. Berdikari di bidang ekonomi
3. Berkepribadian budaya Indonesia

Pariotisme menyangkut pula cinta kepada harga diri manusia yang hidup dari dan sekaligus menghidupi tanah airnya sebagai lingkungan dan habitatnya yang kongkrit. Jadi pada intinya patriotisme mengajarkan agar tiap orang rela berkorban segala-galanya demi kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nasionalisme dan patriotisme mempunyai hubungan yang erat, bahkan tidak dapat dipisahkan. Patriotisme mengajarkan pada kita untuk selalu mencintai tanah air sebagai tempat berpijak, tempat hidup, dan penghidupan, serta mengajarkan kita agar mencintai seluruh isi di dalamnya.

Sri Kartini (tth:43) menyebutkan beberapa ciri patriotisme yang sejati, yaitu:

- a. Membuat kita mampu mencintai bangsa dan negara sendiri, tanpa menjadikannya sebagai tujuan untuk dirinya sendiri melainkan menciptakannya menjadi suatu bentuk solidaritas untuk mencapai kesejahteraan masing-masing dan bersama seluruh

warga bangsa dan negara. Patriotisme sejati adalah solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa.

- b. Berani melihat diri sendiri seperti apa adanya dengan segala plus-minusnya, unsur positif negatifnya, dan menerimanya dengan lapang hati.
- c. Memandang bangsa dalam perspektif historis, masa lampau masa kini, dan masa depan. Patriotisme sejati adalah bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa, berjuang dulu masa kini, menuju cita-cita yang ditetapkan.
- d. Melihat, menerima, dan mengembangkan watak kepribadian bangsa sendiri.
Patriotisme sejati adalah rasa memiliki identitas diri.
- e. Melihat bangsanya dalam konteks hidup dunia, mau terlibat didalamnya dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain. Patriotisme bersifat terbuka

3) Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial muncul karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok baik kelompok kecil maupun besar. Manusia hidup saling tergantung satu dengan lainnya, adanya perasaan saling menyatu serta saling membutuhkan. Karena itu manusia

mempunyai perasaan empati dan simpati. Perasaan empati adalah perasaan yang mampu membaca dalamnya hati, pikiran, perasaan atau keseluruhan manusia sehingga menjadi dasar bagi manusia ketika melakukan sesuatu dan ketika melakukan tindakan sosial. Sifat empati ini bersifat searah, ditunjukkan kepada seseorang tanpa harus mengenal orang yang diberi bantuan terlebih dahulu. Sedangkan simpati adalah perasaan tenggang rasa antara dua orang yang saling mengenal satu sama lain sehingga menyebabkan kedua orang tersebut saling membantu atau mendukung. Kedua hal ini merupakan sumber utama terciptanya kesetiakawanan sosial. Sehingga setiap orang dapat menciptakan lingkungan hidup yang demokratis, adil, dan sejahtera.

Rasa kebersamaan timbul dari dalam diri seseorang yang saling membutuhkan orang lain. Dengan kebersamaan yang terjaga, akan muncul perasaan saling memahami satu sama lain. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus menyebabkan adanya perasaan berhubungan secara erat pada seseorang tersebut atau kesetiakawanan . Ratno Lukitno (2008: 352) berpendapat bahwa

“Kesetiakawanan adalah sebuah perasaan berhubungan secara utuh yang membuat siapapun yang mempunyai perasaan ini menjadi sanak keluarga. Kesetiakawanan adalah perasaan timbal balik. Ia adalah sebuah perasaan menyadari kebaikan, yang di satu sisi mengikat mereka yang memiliki perasaan ini

begitu kuat sehingga mengenyampingkan semua perbedaan yang timbul karena konflik ekonomi atau gradasi sosial, sementara di sisi lain akan mengasingkan mereka yang tidak termasuk ke dalam kelompok mereka. kesetiakawanan adalah keinginan untuk terlibat dengan kelompok lain. Keberadaan rasa kesetiakawanan ini adalah fondasi dari sebuah negara yang stabil dan demokratis”.

Terdapat lima aspek ciri nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat. Pertama, adanya rasa saling membutuhkan di antara anggota masyarakat. Kedua, kemampuan masyarakat dalam menemukendali kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat. Ketiga, kemampuan masyarakat mengarahkan dirinya dalam mengatasi masalah sosialnya serta mampu mengembangkan dan mengatur potensi sumbernya. Keempat, timbulnya rasa identitas diri masyarakat. Kelima, kemampuan advokasi sosial internal dan eksternal masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dilandasi spirit kesetiakawanan sosial.

Kesetiakawanan sosial menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2009 adalah Nilai-nilai dan semangat kepedulian sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan atas dasar empati dan kasih sayang. Adapun nilai moral yang terkandung dalam kesetiakawanan sosial di antaranya sebagai berikut:

1. Tolong menolong. Nilai moral ini tampak dalam kehidupan masyarakat, seperti: tolong menolong sesama tetangga.

Misalnya membantu korban bencana alam atau menengok tetangga yang sakit.

2. Gotong-royong, misalnya menggarap sawah atau membangun rumah.

3. Kerjasama. Nilai moral ini mencerminkan sikap mau bekerjasama dengan orang lain walaupun berbeda suku bangsa, ras, warna kulit, serta tidak membeda-bedakan perbedaan itu dalam kerjasama.

4. Nilai kebersamaan. Nilai moral ini ada karena adanya keterikatan diri dan kepentingan kesetiaan diri dan sesama, saling membantu dan membela. Contohnya menyumbang sesuatu ke tempat yang mengalami bencana, apakah itu banjir, kelaparan atau diserang oleh bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial (solidaritas sosial) adalah perasaan seseorang yang bersumber dari rasa cinta kepada kehidupan bersama sehingga diwujudkan dengan amal nyata berupa pengorbanan dan kesediaan menjaga, membela, maupun melindungi terhadap kehidupan bersama. Kesetiakawanan sosial adalah ciri atau sifat yang berangkat dari sikap dan perilaku untuk bersimpati dan berempati kepada orang lain. Rasa simpati dapat terjalin baik, jika kita saling mengenal dan mendalami. Jika kita bersimpati kepada orang lain, orang lain pun tentu akan

bersimpati dengan kita. Sebaliknya, empati dapat terjalin dari seseorang, tanpa harus orang lain berempati kepada kita.

Dari pengertian kesetiakawanan tersebut kita bisa merasakan atau menilai rasa kemanusiaan seseorang. Rasa kesetiakawanan bermakna kepentingan pribadi tetap diletakkan dalam kerangka kesadaran kewajiban sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kewajiban terhadap masyarakat dan bangsa dirasakan lebih besar dari kepentingan pribadinya.

Berdasarkan pada beberapa pendapat mengenai sikap dan kesetiakawanan sosial, maka sikap kesetiakawanan sosial adalah kecenderungan seseorang untuk berfikir dan bertindak yang dilandasi pengertian, kesadaran, tanggung jawab, kesetaraan dan partisipasi sosial untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah sosial sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih. Dengan selalu mengaplikasikan nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan sehari-hari berupa tolong-menolong, gotong-royong, kerjasama dan kebersamaan

Menurut Pratiwi (2010) kesetiakawanan adalah: Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial adalah merupakan potensi spritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan Nurani

bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Oleh karena itu kesetiakawanan sosial merupakan nilai dasar yang ada dalam masyarakat yang harus terus digali, dikembangkan dan didayagunakan dalam mewujudkan cita-cita. Sebagai nilai dasar kesejahteraan sosial, kesetiakawanan sosial harus terus diperbaiki sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.

BAB IV

NILAI MORAL DALAM PENDIDIKAN

KARAKTER

A. Pengertian Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Nilai dapat merujuk pada sekumpulan kebaikan yang disepakati bersama. Ketika kebaikan *tersebut* menjadi aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur dalam menilai sesuatu, maka itulah yang kemudian disebut dengan norma.

Terdapat dua macam nilai dalam kehidupan ini yaitu moral dan nonmoral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan adalah hal-hal yang dituntut dalam kehidupan ini. Kita akan merasa tertuntut untuk menepati janji, membayar berbagai tagihan, memberi pengasuhan kepada anak-anak, dan berlaku adil dalam bergaul di masyarakat. Nilai-nilai moral meminta kita untuk melaksanakan apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita harus melakukannya bahkan sekalipun sebenarnya kita tidak ingin melakukannya. Nilai-nilai nonmoral tidak membawa tuntunan-tuntunan seperti di atas. Nilai tersebut lebih menunjukkan sikap yang berhubungan dengan apa yang kita

inginkan ataupun yang kita sukai. Nilai-nilai moral (yang menjadi tuntunan) dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu universal dan nonuniversal. Nilai-nilai moral universal seperti memperlakukan orang lain dengan baik, serta menghormati pilihan hidup, kemerdekaan, dan kesetaraan dapat menyatukan semua orang di mana pun mereka berada karena kita tentunya menjunjung tinggi dasar-dasar nilai kemanusiaan dan penghargaan diri. Kita memiliki hak dan kewajiban untuk menuntut agar kita semua dapat berlaku sejalan dengan nilai-nilai moral yang berlaku secara universal ini. Sebaliknya, nilai-nilai moral yang bersifat nonuniversal tidak membawa tuntutan moral yang bersifat universal. Ini adalah nilai-nilai seperti kewajiban yang berlaku pada agama-agama tertentu (ketaatan, berpuasa, dan memperingati hari besar keagamaan) yang secara individu menjadi sebuah tuntutan yang cukup penting. Namun, hal tersebut tentu dirasakan sama dengan individu lain.

B. Unsur – unsur Nilai

Nilai mencakup tiga wilayah yaitu nilai intelektual (benar - salah), nilai estetika (indah - tidak indah), dan nilai etika (baik – buruk). Namun secara garis besar menurut Linda (1995:32), nilai dapat dibedakan menjadi 2 kelompok kelompok pertama, yaitu Nilai – nilai nurani (*Values of being*) yaitu nilai – nilai yang ada dalam diri manusia kemudian berkembang menjadi sebuah

perilaku serta cara bagaimana kita memperlakukan orang lain, contohnya nilai kejujuran, keberanian, cinta damai, keandalan diri, potensi, kedisiplinan, tahu batas, kemurnian, dan kesesuaian. Sedangkan kelompok kedua, yaitu nilai – nilai memberi (*values of giving*) yaitu nilai yang diperlukan untuk dipraktikkan atau diberikan kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan, sebagai contohnya yaitu setia, dapat dipercaya, hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois, baik hati, ramah dan murah hati.

Mengembangkan sejumlah nilai yang menjadi target pengajaran Perguruan Tinggi sebaiknya memulai pengajaran nilai mengenai rasa hormat dan tanggung jawab yang saya rasa dapat menjadi langkah awal yang membantu dan menutupnya dengan pemahaman akan sebagian atau bahkan seluruh nilai-nilai tersebut. Selain itu, pengaplikasian proses, melalui penyusunan tahapan pengajaran nilai masih menjadi hal yang penting juga. Proses tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk membawa atau setidaknya untuk survey input seluruh guru, staf administrasi, staf Perguruan Tinggi bidang lain, orang tua, siswa, dan perwakilan masyarakat untuk mendapat dukungan dalam skala besar. Lebih jauhnya, sejumlah Perguruan Tinggi/ wilayah yang ikut terlibat dalam program ini lebih cenderung untuk menjadikan program yang dimaksud sebagai program khusus dan menjadi prioritas daerah.

Cara dalam mencari tahu titik-titik kelemahan moral kita bersifat intruktif bila harus dihadapkan pada beragamnya masyarakat. Khususnya Negara yang penduduknya memiliki masyarakat yang berbeda dengan yang kita miliki. Misalnya, ketika Menteri Pendidikan mengidentifikasi dua puluh nilai untuk diajarkan di Perguruan Tinggi di Ontario, Kanada, daftar dari nilai-nilai tersebut termasuk pula control diri, kesabaran, dan perdamaian. Tiga nilai yang dirasa tidak akan muncul pada daftar nilai di AS, tetapi jelaslah penting untuk kebaikan kehidupan baik secara individu maupun masyarakat.

Mendapat kesepakatan tentang nilai-nilai yang diajarkan tentunya tidak akan menjamin bahwa orang-orang akan sepaham menangani bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai tersebut di dalam setiap kesempatan. Itu adalah hal yang paling utama dalam pendidikan nilai, khususnya ketika terjadi konflik yang disebabkan pandangan moral atau adanya sebuah kecenderungan dari pihak lain. Misalnya, ukuran bagaimana yang seharusnya diberikan pada” rasa hormat terhadap kehidupan” dan “kebebasan memilih” dalam perdebatan mengenai isu aborsi? Apa makna “patriotisme” pada masa peperangan?

Namun, ketidaksepahaman dalam tahap aplikasi atau pelaksanaan janganlah mengaburkan makna nilai-nilai sendiri (seperti: penghormatan terhadap hidup, kebebasan dan tanggung jawab sebagai warga Negara) atau menghilangkan bukti-bukti

bahwa sebenarnya kebanyakan waktu yang kita gunakan untuk menerjemahkan makna nilai moral yang telah kita tahu ke dalam kehidupan sosial. Banyak hal tertulis yang mewakili berbagai cara yang telah disepakati bersama-sama untuk dijadikan nilai dan dilaksanakan, seperti adanya hukum-hukum yang berlaku bagi warga negara kita dan adanya bentuk-bentuk pernyataan mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ketika hal-hal tersebut dikaitkan kembali dengan nilai-nilai moral, kita semua ingin agar generasi-generasi penerus kita memilikinya sebagai bagian dari hidup mereka, dan pada dasarnya kita setuju dengan hal-hal tersebut. Kita tidak ingin anak-anak berbohong, menyontek dalam ujian, atau mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik, saling memukul, atau bersikap kasar terhadap binatang; tetapi kita ingin agar mereka berbicara jujur, berlaku adil, sopan, menghormati para orang tua dan guru mereka, menyelesaikan pekerjaan rumah mereka, dan bersikap baik satu sama lain.

Singkatnya, meskipun kita berada dalam sebuah lingkungan yang masyarakatnya memiliki makna nilai yang bertentangan, kepedulian, tanggung jawab, dan manifestasi kehidupan kitalah yang sebenarnya menjadi dasar dari kehidupan moral kita. Mengenal pemikiran dasar yang secara umum dapat diterima oleh seluruh masyarakat adalah langkah awal yang paling

utama dalam memberikan pendidikan tentang nilai di Perguruan Tinggi.

C. Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan Penanaman Nilai (*inculcation approach*) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan nilai adalah diterimanya nilai-nilai sosial tertentu oleh siswa dan berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai nilai-nilai sosial yang diinginkan (Superka, et al. 1976 : 16). Menurut pendekatan ini, metode yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisonal. Banyak kritik dalam berbagai literatur barat yang ditujukan kepada pendekatan ini. Pendekatan ini dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi (Banks, 1985; Windmiller, 1976: 13). Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya sendiri secara bebas. Kehidupan manusia berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Siapa pun, termasuk pendidik, tidak dapat meramalkan nilai yang sesuai untuk generasi yang akan datang. Setiap generasi mempunyai hak untuk menentukan nilainya sendiri. Oleh karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi

muda bukanya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya.

Dalam perkembangannya, pendekatan penanaman nilai mungkin tidak sesuai dengan alam pendidikan Barat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu. Meskipun demikian, seperti dijelaskan oleh Superka, et. al (1976:18) pendekatan ini digunakan secara meluas dalam berbagai masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-nilai agama dan budaya. Para penganut agama memiliki kecenderungan yang kuat untuk menggunakan pendekatan ini dalam pelaksanaan program-program pendidikan agama. Bagi para penganut-penganutnya, agama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai ideal yang bersifat global dan kebenarannya bersifat mutlak.

Pendekatan Analisis nilai (*value analysis approach*) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berfikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Sementara itu, pendekatan perkembangan kognitif lebih berfokus pada dilema moral yang bersifat perseorangan.

Ada dua tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. *Pertama*, membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berfikir logis dan penemuan ilmiah dalam menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu, *Kedua*, membantu siswa untuk menggunakan proses berfikir rasional dan analitik, dalam menghubungkan-hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya, metoda-metoda pengajaran yang sering digunakan adalah pembelajaran secara individu atau kelompok tentang masalah-masalah sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional (Superka,et.al 1976:16).

Menurut pendekatan ini, ada enam langkah analisis nilai yang penting dan perlu diperhatikan dalam proses pendidikan karakter (Hersh, et. al 1980; Elias, 1989:14). Enam langkah tersebut menjadi dasar dan sejajar dengan enam tugas penyelesaian masalah berhubungan dengan nilai Enam langkah dan tugas tersebut sebagai Berikut:

Tabel 7. Langkah analisis Nilai dalam Pendidikan

Karakter

Langkah Analisis Nilai	Tugas penyelesaian masalah
1. Mengidentifikasi dan menjelaskan nilai yang terkait.	1. Mengurangi perbedaan penafsiran tentang nilai yang terkait
2. Mengumpulkan fakta yang berhubungan	2. Mengurangi perbedaan dalam fakta yang berhubungan
3. Menguji kebenaran fakta yang berkaitan	3. Mengurangi perbedaan kebenaran tentang fakta yang bersangkutan
4. Menjelaskan kaitan antara fakta yang bersangkutan	4. Mengurangi perbedaan tentang antara fakta yang bersangkutan
5. Merumuskan keputusan moral sementara	5. Mengurangi perbedaan dalam merumuskan keputusan sementara
6. Menguji prinsip moral yang digunakan dalam pengambilan keputusan	6. Mengurangi perbedaan dalam pengujian prinsip moral yang diterima

Yang menganjurkan pendekatan ini adalah Jerrold Combs, Milton Miieux, dan James Chadwick sebagai

representasi dari kelompok pakar pendidikan, filosof, dan pakar psikologi (Elias, 1989: 48). Kekuatan pendekatan ini, antara lain, mudah diaplikasikan dalam aplikasi dalam ruang kelas karena penekanannya pada pengembangan kemampuan kognitif. Selain itu, pendekatan ini menawarkan langkah-langkah yang sistematis dalam pelaksanaan proses pembelajaran moral.

Dengan demikian pendekatan penanaman ataupun internalisasi nilai, tidak hanya berdasarkan kepada prosedur analisis nilai yang ditawarkan serta tujuan dan metoda pengajaran yang digunakan, tetapi juga menggabungkan pendekatan perkembangan kognitif dan pendekatan klarifikasi nilai.

D. Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*) member penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Menurut pendekatan ini, tujuan pendidikan karakter ada tiga. *Pertama*, membantu siswa agar menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. *Kedua* membantu siswa agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilai sendiri: *Ketiga*, membantu siswa agar mampu menggunakan secara bersama-

sama kemampuan berfikir rasional dan kesadaran emosional, mampu memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Dalam proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metode dialog, menulis, diskusi dalam kelompok besar atau kecil, dan lain-lain (Raths.et.Al, 1978: 43).

Pendekatan ini antara lain dikembangkan oleh Raths, Harmin, dan Simon (Shaver, 1976: 43). Mereka telah menulis sebuah buku, yang membahas secara rinci tentang pendekatan ini dengan judul, yang membahas secara rinci tentang pendekatan ini dengan judul *Value and Teaching: Working with Values in the Class-room*. Edisi pertama buku tersebut diterbitkan pada tahun 1966 oleh penerbit Charles E.Merrill. Istilah “*values clarification*” pertama kali digunakan oleh Louis Raths pada tahun 1950- an, ketika beliau mengajar di New York University.

Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang. Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subyektif. Ditentukan oleh seorang berdasarkan berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu. Bagi penganut pendekatan ini, isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Sejalan dengan pandangan tersebut, bagi penganut pendekatan ini, guru bukan sebagai pengajar nilai,

melainkan sebagai *role* model dan pendorong. Peranan guru adalah mendorong siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai.

Ada tiga proses klarifikasi nilai menurut pendekatan ini. Dalam tiga proses tersebut terdapat tujuh sub proses sebagai berikut (Raths, et. al 1978: 12):

Tabel 7. Proses Klarifikasi Nilai

Proses	Subproses
Pertama, memilih	(1). Dengan bebas (2). Dari berbagai alternative (3). Setelah mengadakan pertimbangan tentang berbagai akibatnya
Kedua, menghargai	(4). Merasa bahagia atau gembira dengan pilihannya (5). Mau mengajui pilihannya itu di depan umum
Ketiga, bertindak	(6). Berbuat sesuatu sesuai dengan pilihannya (7). Diulang-ulang sebagai suatu pola tingkah laku dalam hidup

Untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai tersebut, Raths,et. al (1978:13) telah merumuskan juga empat pedoman sebagai kunci penting, yaitu sebagai berikut:

1. *Tumpuan perhatian diberikan pada kehidupan.* Yang dimaksudkan adalah berusaha untuk mengarahkan tumpuan perhatian orang pada berbagai aspek

kehidupan mereka sendiri, supaya mereka dapat mengidentifikasi hal-hal yang mereka nilai.

2. *Penerimaan sesuai dengan apa adanya.* Yang dimaksud adalah ketika kita memberi perhatian pada klarifikasi nilai, kita perlu menerima posisi orang lain tanpa pertimbangan, sesuai dengan apa adanya.
3. *Situmulus untuk bertindak lebih lanjut.* Artinya, kita perlu lebih banyak berbuat sebagai refleksi nilai, dari pada sekedar menerima.
4. *Pengembangan kemampuan perseorangan.* Artinya, dengan pendekatan ini bukan hanya mengembangkan keterampilan klarifikasi nilai, tetapi juga mendapat tuntunan untuk berfikir dan berbuat lebih lanjut.

Kekuatan pendekatan ini terutama memberikan penghargaan yang tinggi kepada siswa sebagai individu yang mempunyai hak untuk memilih, menghargai, dan bertindak berdasarkan kepada nilainya sendiri. Metode pengajarannya juga sangat fleksibel, selama dipandang sesuai dengan rumusan proses menilai dan empat garis paduan yang ditentukan, seperti telah dijelaskan di atas.

Sama halnya dengan pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan ini juga mengandung kelemahan menampilkan bias

budaya barat. Dalam pendekatan ini, kriteria benar salah sangat relatif, karena sangat mementingkan nilai perseorangan. Dari pendapat di atas, pendidikan nilai menurut pendekatan ini tidak memiliki sesuatu tujuan tertentu berkaitan dengan nilai. Sebab, bagi penganut pendekatan ini, menentukan sejumlah nilai untuk siswa adalah tidak wajar dan tidak etis.

Pada sisi lain, nilai-nilai itu harus diterima dan dipercayai. Oleh karena itu, proses pendidikannya harus bertitik tolak dari ajaran atau nilai-nilai tersebut. Seperti dipahami bahwa dalam banyak hal batas-batas nilai kebenaran dalam ajaran agama sudah jelas, pasti, dan harus diimani. Ajaran agama tentang berbagai aspek kehidupan harus diajarkan, diterima, dan diyakini kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya. Keimanan merupakan dasar penting dalam pendidikan agama.

Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) adalah pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai pendekatan indoktrinatif oleh penganut filsafat liberal, namun berdasarkan kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah yang dianut bangsa Indonesia, pendekatan ini dipandang paling sesuai. Alasan-Alasan untuk mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak

dari nilai-nilai sosial tertentu yakni nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

2. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa Indonesia, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya: hak sebagai pembeli, disertai kewajiban sebagai pembeli terhadap penjual, hak sebagai anak, disertai kewajiban sebagai anak terhadap orang tua: hak sebagai pegawai negeri, disertai kewajiban sebagai pegawai negeri terhadap masyarakat dan Negara; dan sebagainya. Dalam rangka pendidikan karakter, siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.
3. Selanjutnya, menurut konsep luhur bangsa Indonesia, hakekat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk Individu. Sehubungan dengan hakekatnya itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban asasi tersebut juga dihargai secara berimbang. Dalam rangka pendidikan karakter, siswa juga perlu diperkenalkan dengan baik hak dan kewajiban asasinya sebagai manusia.

4. Dalam pembelajaran pendidikan karakter di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting. Dalam hal ini berbeda dengan pendidikan moral dalam masyarakat liberal, yang hanya mementingkan proses atau ketrampilan dalam membuat kepentingan moral. Pengajaran nilai menurut pandangan tersebut merupakan suatu indoktrinasi yang harus di jauhi. Anak harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan nilainya sendiri. Pandangan ini berbeda dengan falsafah dan budaya luhur bangsa Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya berzina, berjudi, adalah perbuatan tercela, yang harus dihindari: orang tua harus dihormati, dan sebagainya. Nilai-nilai ini harus diajarkan kepada anak, sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam pembelajaran pendidikan karakter, factor isi nilai dan proses sama-sama diperhentikan.

Dalam praktiknya, berbagai metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan-pendekatan lain dapat digunakan juga dalam pembelajaran pendidikan karakter. Implementasinya sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan dalam pendekatan Perkembangan Moral Kognitif. Misalnya, mengangkat

dan mendiskusikan kasus dan masalah moral dalam masyarakat yang mengandung dilema. Untuk didiskusikan dalam kelas. Penggunaan metode ini akan dapat menghidupkan suasana kelas. Namun, berbeda dengan pendekatan Perkembangan Moral kognitif yang memberikan kebebasan penuh kepada siswa untuk berfikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan tingkat perkembangan moral reasoning maskter masing-masing, dalam pembelajaran pendidikan karakter siswa diarahkan sampai pada kesimplan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari nilai dan budaya luhur bangsa Indonesia.

2. Metode pengajaran yang digunakan Pendekatan Analisis Nilai, khususnya prosedur analisis nilai dan penyelesaian masalah yang ditawarkan, bermanfaat juga untuk diaplikasikan sebagai salah satu strategi dalam proses pembelajaran pendidikan karakter. Seperti telah dijelaskan bahwa aspek perkembangan kognitif merupakan aspek yang dipentingkan juga, yakni untuk mendukung dan menjadi dasar dari pengembangan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan penegasan Haydon (1995) bahwa pengetahuan dan pemahaman konsep adalah penting dalam pendidikan moral, untuk

membentuk sikap moral yang lebih stabil dalam diri seseorang.

3. Metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan Klarifikasi nilai yang memperhatikan factor keadaan serta bahan pengajaran yang relavan, dapat diaplikasikan juga dalam pembelajaran pendidikan karakter. Meskipun demikian, seperti dijelaskan oleh Prayitno (1994:63), penggunaanya perlu hati-hati, supaya tidak membuka kesempatan bagi siswa untuk memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakatnya, terutama nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa yang ingin hidup dibudayakan dan ditanamkan dalam diri mereka.
4. metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan pembelajaran berbuat bermanfaat juga untuk diaplikasikan dalam pembelajaran pendidikan karakter. Para siswa pada tingkat tertentu lebih tepat untuk melakukan tugas-tugas di luar ruang kelas, yang dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan lingkungan, seperti yang dituntut oleh pendekatan ini. Meskipun demikian, mengingat kelemahan-kelemahan pendekatan ini. Penggunaan metode dan strategi pengajaran berdasarkan kepada pendekatan ini dapat digunakan dalam batas-batas yang memungkinkan . untuk itu, perlu dirumuskan program-

program yang sederhana dan memungkinkan untuk dilaksanakan pada masing-masing Perguruan Tinggi.

E. Konsep Moral

Istilah moral berasal dari kata *moralis* (latin) yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup; sama dengan etika, yang berasal dari kata *ethos* (Yunani). Tema moral erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial yang teruji secara langsung sehingga moral sangat terkait dengan nilai etika. Moral berarti kesucilaan, tabiat atau kelakuan: ajaran kesucilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesucilaan (Salam,2000:17). Selanjutnya, Driyakara mengatakan bahwa moral atau kesucilaan adalah nilai yang sebenarnya bagi manusia. Dengan kata lain moral atau kesucilaan adalah kesempurnaan sebagai manusia atau kesucilaan sebagai tuntutan kodrat manusia

Huky (dalam Daroeso,1986:16) mengatakan terdapat tiga cara dalam memahami moral, yaitu:

1. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan diri pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.
2. Moral sebagai perangkat ide – ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan tertentu.

3. Moral adalah ajaran tentang tingkah laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.

Dari beberapa pengertian moral dapat dilihat bahwa moral memegang peranan penting dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan baik buruk terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku ini mendasarkan diri pada norma – norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan bermoral, bilamana orang tersebut bertingkah laku sesuai dengan norma – norma yang terdapat di masyarakat. Seorang individu yang tingkah lakunya mentaati kaidah – kaidah yang berlaku dalam masyarakatnya disebut baik secara moral, dan jika sebaliknya, ia disebut jelek secara moral (*immoral*). Dengan demikian moral selalu berhubungan dengan nilai – nilai. Ciri khas yang menandai nilai moral yaitu tindakan manusia yang dilakukan secara sengaja, dan tindakan itu secara langsung berkenaan dengan nilai pribadi (*person*) manusia dan masyarakat.

Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang dimaksud dengan moral dan mengapa harus aspek moral. Mengapa penting bagi kita untuk menepati janji? Lakukanlah pekerjaan terbaik saya? Membagikan apa yang saya miliki dengan orang lain? Pemikiran moral telah menjadi fokus dari sebagian besar riset psikologis abad ini pada pengembangan moral, yang diawali dengan buku karangan Jean Piaget, *The Moral Judgement*

of the Child terbitan tahun 1932 dan berkanjut dengan riset Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan, William Damaon, Nancy Eisbenberg, James Rest, mary Brabeck, dan para peneliti lainnya.

Seiring anak-anak mengembangkan pemikiran moral mereka dan riset yang ada menyatakan kepada kita bahwa pertumbuhan bersifat gradual mereka mempelajari apa yang dianggap sebagai pemikiran moral yang naik karena melakukan suatu hal. Di tingkat yang lebih tinggi, pemikiran moral juga hakiki intrinsik setiap individu'; bertindaklah untuk mencapai kebaikan yang terbaik demi jumlah yang paling besar': dan bertindaklah seolah oleh anda akan membuat semua orang lain akan melakukan hal yang sama di bawah situasi yang serupa. Prinsip-prinsip seperti itu memandu tindakan moral dalam berbagai macam situasi yang berbeda.

“To define criteria for a “moral exemplar “and then to suggest persons who fit those criteria. There was a surprisingly high degree of consensus on five criteria for examplars: (1) a sustained commitment to moral ideals; (2) a consistency between one’s ideals and means of achieving them; (3) a willingness to sacrifice self-interest; (4) a capacity to inspire others; and (5) a humility about one’s own importance” (Thomas Lickona, 2004: 21).

Dengan demikian moral adalah keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan yang baik dan benar.

F. Perkembangan Penalaran Moral

Perkembangan moral pada dasarnya merupakan interaksi suatu hubungan timbal balik antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara peserta didik dengan pendidik, dan seterusnya. Unsur hubungan timbal balik ini sedemikian penting karena hanya dengan adanya interaksi berbagai aspek dalam diri seseorang (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dengan sesamanya atau dengan lingkungannya, maka seseorang dapat berkembang menjadi semakin dewasa baik secara fisik, spiritual, dan moral (Syarkawi,2006:76). Dengan interaksi maka kesejajaran perkembangan moral, kognitif dan inteligensi akan terjadi secara harmonis. Hal itu sejalan dengan pandangan Piaget bahwa intelegensi berkembang sebagai akibat hubungan timbal balik antara unsur keturunan dan lingkungan, hubungan itu begitu menentukan sama halnya dalam perkembangan moral seseorang.

Perkembangan moral merupakan proses dinamis yang umum dalam setiap budaya. Moral berkembang menurut serangkaian tahap perkembangan psikologis. Kohlberg telah menunjukkan dengan hasil penelitiannya bahwa – tahap perkembangan moral berlaku sama bagi setiap orang, tidak memandang lingkup budaya, tempat, kelas dalam masyarakat, kasta, dan agama. Tahap – tahap perkembangan moral menurut Kohlberg menunjukkan suatu tingkatan sistematis, urutan bertahap, dari tingkat prakonvensional sampai

pascakonvensional. Itu berarti bahwa perkembangan pengertian dan pertimbangan moral dibatasi oleh perkembangan umur dan tahapan.

G. Nilai Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Kirchenbaum (1998 :102-104) menganjurkan dalam pembelajaran yang menyangkut nilai moral hendaknya menggunakan pendekatan yang komprehensif meliputi inkulkasi, permodelan, perkembangan kognitif fasilitasi dan pengembangan keterampilan. Pendekatan inkulkasi adalah pendekatan penanaman nilai yang memberi penekanan pada penanaman nilai – nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan dari pendidikan nilai menurut pendekatan ini adalah diterimanya nilai – nilai sosial yang diinginkan.

Selanjutnya pendekatan permodelan adalah pendekatan dengan pemberian keteladanan perilaku dan dengan sengaja dilakukan sebagai upaya penanaman nilai dan pembentukan perilaku tertentu. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan perkembangan kognitif adalah pendekatan dengan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah – masalah moral dan dalam pengambilan keputusan moral, menurut pendekatan ini perkembangan moral dilihat sebagai

perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral.

Sedangkan pendekatan fasilitasi memberi penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai sosial. Dalam percakapan sehari – hari di tengah masyarakat yang belum pernah mengenal konsep “*logical positivism*”, makna filosofis dari konsep tersebut hanyalah dipandang sebagai angin lalu dalam konsep moral. Kalaupun pernah memberikan tanggapan tentang sebuah pandangan moral, hal tersebut hanyalah urusan sikap pandang”. Sikap pandang terhadap nilai secara otomatis terabaikan dan hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat “pandangan secara individu” daripada sesuatu yang beralasan dan memiliki tujuan yang bermakna baik – buruk atau lebih baik - lebih buruk. Moralitas telah diprivatisasi dibuat menjadi sesuatu yang seutuhnya merupakan sebuah pilihan yang bersifat individu, dan bukanlah urusan public yang otomatis menjadikan hal tersebut sesuatu yang tidak harus disampaikan di Perguruan Tinggi (Thomas Lickona, 2012: 11).

Jika kita ingin para murid di Perguruan Tinggi memiliki moral yang baik maka, Perguruan Tinggi sendiri harus menjadi institusi yang bermoral/ bermoral institusi. Misalnya siswa di Sekolah Menengah Atas mengalami berbagai persoalan kompleksitas. Anak – anak SMA yang sekarang adalah dulunya

anak – anak SD yang luar biasa, hangat, sangat peduli terhadap orang lain. Akan tetapi setelah mereka duduk di SMA mereka kehilangan semua sifat baik, kenapa hal itu terjadi? Apakah mereka punya alasan untuk tidak melakukan moral baik yang sebelumnya mereka lakukan? Mengapa pula murid SMA bersikap *self centered*? Jawabanya karena lingkungan tidak lagi mendukung etos atau budaya moral Perguruan Tinggi yang tidak membangkitkan moral terbaik para murid bahkan mereka takut bertindak karena alasan gengsi mereka.

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan kemerdekaan, tanggung jawab terhadap orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, penghormatan, disiplin diri, integritas, kebaikan, belas kasihan, dan dorongan atau dukungan mendefinisikan seluruh cara tentang menjadi pribadi yang baik. Ketika digabung, seluruh nilai ini menjadi warisan moral yang diturunkan dari satu generasi-generasi berikutnya. Literasi etika memerlukan pengetahuan akan nilai-nilai ini.

Mengetahui sebuah nilai juga berarti memahami bagaimana caranya menerapkan nilai yang bersangkutan dalam berbagai macam situasi. Apakah yang dimaksudkan dengan “tanggung jawab” ketika Anda melihat seseorang yang menodai properti sekolah atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya? Apa yang dikatakan “rasa hormat” ketika para siswa, baik laki-laki maupun perempuan, menyampaikan melalui kuisisioner bahwa

tidak masalah bagi seorang pria untuk memaksakan hubungan seks kepada wanita apabila pria tersebut membelikannya banyak hal. Sebenarnya, hal ini menyampaikan kepada kita bahwa sebagian besar pekerjaan pendidikan moral adalah “penerjemahan” membantu para orang muda menerjemahkan nilai-nilai abstrak dari rasa hormat dan tanggung jawab ke dalam hubungan personal mereka.

Nilai moral manusia terkandung sifat – sifat manusia seluruhnya pikiran, badan, perasaan dan kehendak. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu kesadaran moral sebagai bagian dari proses pertimbangan yang matang dari perilaku seseorang dalam kehidupan sehari – hari. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Driyarkara (1992), dan Kymlicka (dalam Zaim Elmubarak, 2008) menyatakan bahwa relevansi penanaman moral pendidikan yakni membentuk warga negara yang mempunyai rasa keadilan, kemampuan membedakan mana yang baik, dan mana yang buruk, mempunyai penghargaan akan HAM, bersikap toleran, dan memiliki rasa solidier serta loyalitas terhadap orang lain.

Nilai moral dapat dirumuskan dalam bentuk positif dan negatif. Dalam bentuk positif nilai moral nampak sebagai perintah, atau keharusan untuk dilakukan tetapi dapat pula berbentuk negatif yang nampak dalam berbagai larangan untuk menyatakan hal – hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi Nilai

moral dan budi pekerti memang secara umum sulit untuk dipisahkan. Pendidikan nilai mencakup kawasan budi pekerti, norma dan moral. Menurut Ramli Zakaria (2004: 4) menyatakan bahwa pendidikan budi pekerti memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan akhlak mulia. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.

Dengan demikian nilai moral adalah pendidikan yang berusaha mengembangkan komponen – komponen integrasi pribadi. Integrasi pribadi dapat dilukiskan sekurang – kurangnya dengan empat gambaran kepribadian. Menurut John P. Miller (1976:5) gambaran kepribadian menunjukkan beberapa karakteristik. Pertama, pribadi yang terintegrasikan selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Maksudnya, ia memandang hidupnya sebagai suatu proses menjadi dan berusaha memilih pengalaman- pengalaman yang mengakibatkan perkembangan tersebut. Oleh karena itu, ia akan berani menanggung resiko dan menghadapi konflik selagi ia tahu bahwa tanpa resiko itu perkembangannya bertahan. Kedua, pribadi yang terintegrasikan memiliki kesadaran akan jati dirinya dan identitasnya. Ketiga, Pribadi yang terintegrasikan senantiasa terbuka dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Dia tidak memutuskan diri dari orang – orang dan dia dapat mengkomunikasikan rasa empatinya secara jelas terhadap orang

lain. Keempat, pribadi yang terintegrasikan menggambarkan suatu kebulatan kesadaran. Dia dapat menggunakan daya kemampuan intuisi, imajinasi, dan penalarannya.

H. Tahapan Perkembangan Moral

Piaget (dalam Crain, 1985:118 –121) membagi perkembangan penalaran moral menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama di sebut dengan tahap **realisme moral** (*Stage of moral realism*) atau biasa juga disebut dengan moralitas berkendala (*morality by constraint*). Tahapan ini berkembang pada masa balita sampai memasuki Perguruan Tinggi Dasar. Penyesuaian diri dengan peraturan di lingkungannya tanpa telaah rasional. Orang dewasa di sekitarnya dianggap sebagai orang yang serba tahu, sehingga perilaku dan aturan yang ada diikuti saja tanpa pertanyaan benar atau salah.

Tahapan kedua adalah **moralitas otonom** (*stage of autonomous morality*) atau yang dikenal dengan moralitas hasil interaksi seimbang (*morality by cooperations of reciprocity*) dimulai pada anak usia 8 tahun sampai dewasa. Pada masa ini, perilaku dan aturan mulai dikaitkan dengan nilai yang benar dan salah berdasar pemikiran rasional dan hasil interaksi dari lingkungan.

Menurut Kohlberg (dalam Crain,1985:122–136) membagi perkembangan moral berdasar tahapan perkembangan penalaran moral sedang Licona melihat perkembangan moral dalam perwujudan perilaku. Penalaran moral tidak terkait dengan dengan pertanyaan baik- buruk tetapi terkait dengan mengapa sesuatu dianggap baik buruk. Moralitas dipandang sebagai konflik antara kepentingan diri dan lingkungan, sehingga penalaran moral adalah penyelesaian konflik tersebut.

Piaget berusaha mendefinisikan tingkat perkembangan moral pada anak-anak melalui pengamatan dan wawancara (Windmiller, 1976:54) dari hasil pengamatan terhadap anak-anak ketika bermain, dan jawaban mereka atas pertanyaan mengapa mereka patuh kepada peraturan. Piaget sampai pada suatu kesimpulan bahwa perkembangan kemampuan kognitif pada anak-anak mempengaruhi pertimbangan moral mereka.

Kohlberg (1977:87) juga mengembangkan teorinya berdasarkan pada asumsi-asumsi umum tentang teori perkembangan kognitif dari Dewey dan Piaget tersebut. Seperti sudah dijelaskan oleh Elias (1989:54) Kohlberg mendefinisikan kembali dan mengembangkan teorinya menjadi lebih rinci. Menurut Kohlberg, tingkatan perkembangan moral dimulai dari konsekuensi yang sederhana, yang berupa pengaruh kurang menyenangkan dari luar terhadap tingkah laku. Sampai kepada kurang menyenangkan dari luar terhadap tingkah laku, sampai

kepada penghayatan dan kesadaran tentang nilai-nilai kemanusiaan universal lebih tinggi tingkat berfikir seseorang adalah lebih baik, dan otonomi lebih baik dari pada heteronomi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan moral diperinci sebagai berikut :

Tahapan “*Preconventional*”:

Tingkat 1: moralitas heteromus. Dalam tingkat perkembangan ini moralitas dari sesuatu perbuatan ditentukan oleh cirri-ciri dan akibat yang bersifat fisik.

Tingkat 2: moralitas individu dan timbal balik. Seseorang mulai sadar dengan tujuan dan keperluan orang lain. Seseorang berusaha untuk memenuhi kepentingan sendiri dengan mempertahankan orang lain.

Tahapan “*conventional*”

Tingkat 3: moralitas harapan saling antara individu. Kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan dalam tingkat ini ditentukan oleh norma bersama dan hubungan saling mempercayai.

Tingkat 4 : moralitas sistem sosial dan kata hati. Sesuatu perbuatan dinilai baik jika disetujui oleh yang berkuasa dan sesuai dengan peraturan yang menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Tahapan “*postconventional*”:

Tingkat 5: tingkat transisi. Seseorang belum sampai pada tinggkat “*postconventional*” yang sebenarnya. Pada tingkat ini kriteria benar atau salah bersifat personal dan subyektif, dan tidak memiliki prinsip yang jelas dalam mengambil suatu keputusan moral.

Tingkat 6: moralitas kesejahteraan sosial dan hak-hak manusia. Kriteria moralitas dari sesuatu perbuatan adalah yang didapat menjamin hak-hak individu serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Tingkat 7: Moralitas yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang umum, ukuran benar atau salah ditentukan oleh pilihan sendiri berdasarkan prinsip-prinsip moral yang logis, konsisten, dan bersifat universal (Kohlberg (1977:88).

Sementara itu, asumsi-asumsi yang digunakan Kohlberg dalam mengembangkan teori tentang perkembangan moral tersebut sebagai berikut:

- a. Kunci untuk dapat memahami tingkah laku moral seorang adalah dengan memahami filsafat moralnya, yakni dengan memahami alasan-alasan yang melatarbelangi perbuatannya.

- b. Tingkat perkembangan tersusun sebagai suatu keseluruhan cara berfikir. Setiap orang akan konsisten dalam tingkat pertimbangan moralnya.
- c. Konsep tingkat perkembangan moral menyatakan rangkaian urutan perkembangan yang bersifat universal, dalam berbagai kondisi kebudayaan.

Sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut, konsep perkembangan moral menurut teori Kohlberg memiliki empat ciri utama. Pertama, tingkat perkembangan itu terjadi dalam rangkaian yang sama pada semua orang. Seorang tidak pernah melompati suatu tingkat. Perkembangannya selalu ke arah tingkat lebih tinggi. Kedua, tingkat perkembangan itu, selalu tersusun berurutan secara bertingkat. Dengan demikian, seorang yang membuat pertimbangan moral pada tingkat yang lebih tinggi, dengan mudah dapat memahami pertimbangan moral tingkat yang lebih rendah. Ketiga, tingkat perkembangan itu terstruktur sebagai suatu keseluruhan. Artinya, seorang konsisten pada tahapan pertimbangan moralnya. Keempat, tingkat perkembangan ini memberi penekanan pada struktur pertimbangan moral, bukan pada isi pertimbangannya.

Pada dasarnya, pendekatan perkembangan kognitif mudah digunakan dalam proses pendidikan di Perguruan Tinggi karena pendekatan ini memberikan penekanan pada aspek perkembangan kemampuan berpikir. Selain itu, karena

pendekatan ini memberikan perhatian sepenuhnya kepada isu moral dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pertentangan nilai tertentu dalam masyarakat. Penggunaan pendekatan ini menjadi menarik. Dalam praktiknya, pendekatan ini dapat menghidupkan suasana kelas. Teori Kohlberg dinilai paling konsisten dengan teori ilmiah, peka untuk membedakan kemampuan dalam membuat pertimbangan moral, mendukung perkembangan moral, dan melebihi berbagai teori lain yang berdasarkan kepada hasil penelitian empiris.

Walaupun banyak mempunyai keunggulan, pendekatan ini juga memiliki kelemahan-kelemahan. Salah satu kelemahannya, seperti dikemukakan oleh Hersh, et, al (1980:33), pendekatan ini menampilkan bias budaya Barat. Antara lain sangat menjunjung tinggi kebebasan pribadi yang berdasarkan filsafat liberal. Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendekatan ini juga tidak mementingkan kriteria benar salah untuk suatu perbuatan. Yang dipentingkan adalah alasan yang dikemukakan atau pertimbangan moralnya.

Teori Kohlberg juga dikritik karena mengandung bias gender. Dilema yang dikemukakanya dan orientasi penilaian pada keadilan dan hak hanya lebih tepat bagi kaum pria. Berdasarkan kepada hasil uji empiris, kaum wanita cenderung mendapat skor lebih rendah dari kaum pria (Power, 1994:78). Dalam pelaksanaan program-programnya, pendekatan ini hanya

berfokus pada proses dan struktur pertimbangan moral, tetapi mengabaikan nilai dan isi pertimbangannya. Berhubungan dengan hal ini, menurut Ryan dan Lickona (1987:89), pendidikan moral dengan penekanan kepada proses semata dan mengabaikan isi, tidak akan mencapai sepenuhnya apa yang diharapkan. Pada sisi lain, pengakuan Kohlberg bahwa teorinya berdasarkan kepada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dibantah juga oleh Liebert (1992:199). Menurut Liebert, berbagai kajian dalam bidang antropologi tidak mendukung pandangan tentang adanya prinsip-prinsip moral yang universal seperti yang dikemukakan adanya prinsip-prinsip moral yang universal seperti yang dikemukakan Kohlberg. Kenyataan yang ditemukan adalah berbagai norma, standar, dan nilai-nilai moral sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat pendukungnya.

Walaupun pendekatan ini mengandung kelemahan-kelemahan dalam segi-segi tertentu, namun seperti dijelaskan juga oleh Ryan dan Lickona (1987:101), teori ini juga telah memberi sumbangan berharga bagi perkembangan pendidikan moral.

I. Nilai Moral sebagai Pilar Pendidikan Karakter

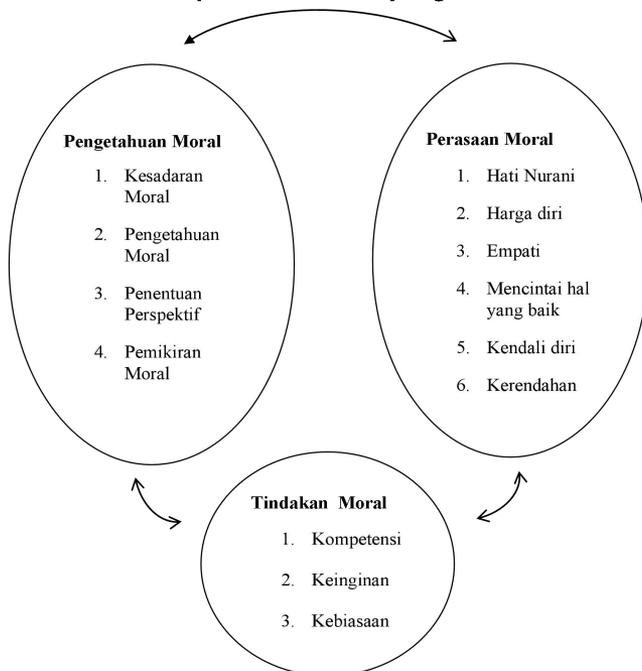
Berdasarkan pada pemahaman klasik ini, penulis bermaksud untuk memberikan suatu cara berfikir tentang karakter yang tepat bagi pendidikan nilai; karakter terdiri dari

nilai operatif, nilai dalam tindakan. Kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik. Karakter yang terasa demikian memiliki tiga bagian yang saling berhubungan; pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral.

Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik dan melakukan hal yang baik, kebiasaan dalam berfikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlakukan untuk mengarahkan suatu kehidupan moral; ketiganya membentuk kedewasaan moral. Ketika kita berfikir tentang jenis karakter yang kita inginkan bagi anak-anak kita, sudah jelas bahwa kita menginginkan anak-anak kita untuk mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar meskipun berhadapan dengan godaan dari dalam dan tekanan dari luar.

Berikut ini digambarkan hubungan nilai moral dengan pendidikan karakter menurut Thomas Lickona (2012: 43) sebagai berikut:

Komponen Karakter yang Baik



Gambar 10. Hubungan nilai moral dalam pendidikan karakter

Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral tidak berfungsi sebagai bagian yang terpisah namun salaing

melakukan penetrasi dan saling mempengaruhi satu sama yang lain dalam cara apa pun.

Penilaian moral dapat meningkatkan perasaan moral, namun emosi moral dapat mempengaruhi pemikiran. Dalam bukunya yang memberi pencerahan, *In Good Conscience; Reason and Emotion in Moral Decision Making*, Psikolog Mercy College Sidney Callahan menunjukkan bahwa banyak dari pemikiran moral kreatif kita muncul dari pengalaman yang sarat emosi. Revolusi moral yang penting telah diawali dengan empati yang dirasakan bagi kelompok yang sebelumnya tidak dianggap (budak, wanita, pekerja, anak-anak, orang-orang berkebutuhan khusus, dan lain-lain).

Penilaian moral dan perasaan moral sudah jelas cukup mempengaruhi perilaku moral kita, utamanya ketika kita bekerja sama, namun, disini juga, pengaruh tersebut bersifat resiprokal; bagaimana kita berperilaku juga mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan merasa (misalnya ketika kita mengampuni dan bertingkah laku baik terhadap seseorang yang kita marahi, kita biasanya mendapati bahwa pemikiran dan perasaan kita yang berhubungan dengan orang tersebut menjadi lebih positif).

Selanjutnya domain karakter dan komponen penyusunannya tampak dalam kehidupan moral yang dijalani, komponen karakter yang bervariasi ini tipikalnya bekerjasama

secara kompleks dan bersamaan yang bahkan mungkin tidak kita sadari.

Aspek kedua dari kesadaran moral adalah memahami informasi dari permasalahan yang bersangkutan. Sangat sering di dalam membuat penilaian moral, kita tidak dapat memutuskan apa yang benar sampai kita tahu apa yang benar. Apabila kita tidak memiliki gagasan yang paling jelas mengenai apa yang terjadi di tingkat internasional. Maka kita tidak mampu untuk membuat penilaian moral yang kokoh tentang kebijakan luar negeri kita. Apabila kita tidak sadar bahwa terdapat kemiskinan di tengah-tengah masyarakat kita atau terdapat penyiksaan di sekian banyak negara atau terdapat kelaparan di sebagian besar belahan dunia maka itu kita tidak mampu mendukung kebijakan atau kelompok sosial yang membantu mengurangi permasalahan semacam itu.

Warga negara yang bertanggung jawab mengharuskan usaha ini untuk diberitahukan. Pendidikan nilai dapat mengajarkan hal tersebut dengan melibatkan para siswa dalam bekerja keras untuk mencoba menentukan fakta yang bersangkutan sebelum mengambil suatu penilaian moral.

Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai hal yang nicaya. John Dewey, Misalnya, pada tahun 1916, pernah berkata. “Sudah merupakan hal lumrah dalam teori pendidikan bahwa

pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di Perguruan Tinggi”.

Kemudian, pada tahun 1918 di Amerika Serikat (AS), Komisi pembaruan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai “Tujuh Prinsip Utama Pendidikan” antara lain :

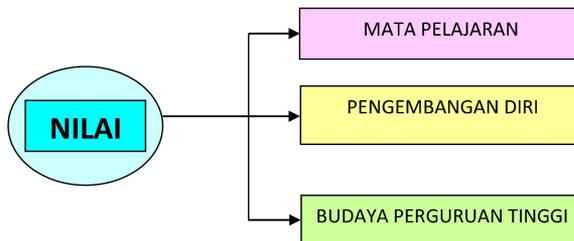
1. Kesehatan
2. Penguasaan proses-proses fundamental
3. Menjadi Anggota keluarga yang berguna
4. Pekerjaan
5. Kewarganegaraan
6. Penggunaan waktu luang secara bermanfaat
7. Watak Susila

Thomas Lickona (2012: 48)

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan karakter bangsa ada empat, yaitu berkelanjutan; melalui semua mata pelajaran atau kuliah, pengembangan diri, dan budaya kampus; nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan; dan proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan (Kemendiknas 2010:11-14). Sedangkan menurut Hidayatullah (2010:36), strategi dalam pendidikan karakter ada

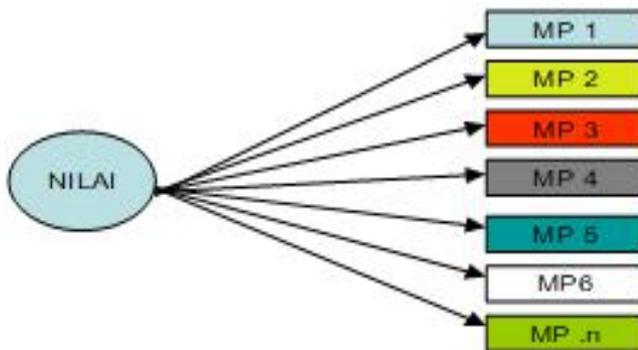
lima, yaitu keteladanan, penanaman kedisiplinan, pembiasaan, menciptakan suasana yang kondusif, dan integrasi dan internalisasi.

1. **Berkelanjutan;** mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.
2. **Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya Perguruan Tinggi;** mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.



Gambar 11. Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa melalui berbagai mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam Standar Isi (SI), digambarkan sebagai berikut ini.



Gambar 12. Pengembangan Nilai Budaya dan Karakter Bangsa melalui Setiap Mata Pelajaran

Program pengembangan diri dapat dilakukan dengan empat program, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Pengintegrasian dalam mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara memasukan pendidikan karakter dalam enam komponen, yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, silabus, perencanaan kegiatan pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. Di samping enam komponen tersebut, pengintegrasian dalam mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara memasukan pendidikan karakter dalam komponen evaluasi dan tugas atau tindak lanjut.

3. **Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan;** mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang **dikemukakan** seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, dan ketrampilan.

Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan

pada diri mereka. Mereka tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham makna nilai itu.

4. **Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan;** prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

Diawali dengan pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, Perguruan Tinggi, dan tugas-tugas di luar Perguruan Tinggi.

Integratif Etika Pendidikan, *The Integratif Etika Pendidikan* (IEE) model memadukan beberapa temuan kunci dari ilmu pengetahuan empiris untuk menyediakan langkah-demi-langkah kerangka kerja untuk mengolah karakter moral (Narvaez, 2006: 112). Langkah-langkah dapat diambil satu per satu atau semua sekaligus. Dalam konteks yang jenuh dengan harapan tinggi untuk perilaku dan prestasi, pendidik *deliberatively* membangun berikut dalam kelas dan Perguruan Tinggi.

Strategi dalam menerapkan pendidikan karakter dalam kelas dan Perguruan Tinggi mencakup lima langkah. Kelima langkah tersebut adalah 1) menciptakan iklim yang mendukung terciptanya perilaku moral dan prestasi tinggi, 2) membina keterampilan etis, 3) gunakan pendekatan magang untuk melatih siswa dalam mempraktekkan nilai, 4) pemeliharaan swa-regulasi keterampilan, dan 5) struktur dukungan dalam membangun karakter dengan masyarakat (Narvaez dan Lapsley 2010:114).

Pendapat mengenai nilai yang perlu ditanamkan dan dikembangkan dalam pendidikan diutarakan oleh Megawangi, Koesoema, Sulhan, Kemendiknas, dan Hidayatullah. Menurut Megawangi (2004:95), nilai-nilai karakter yang bersifat umum yang perlu ditanamkan ada sembilan pilar, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; kemandirian dan tanggung jawab; kejujuran (amanah) dan bijaksana; hormat dan santun; dermawan, suka menolong, dan gotong royong; percaya diri,

kreatif, dan pekerja keras; kepemimpinan dan keadilan; baik dan rendah hati; toleransi, kedamaian, dan kesatuan.

Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada delapan, yaitu keutamaan, keindahan, kerja, cinta tanah air, demokrasi, kesatuan, nilai moral, kemanusiaan (Koesoema 2010:208-211). Menurut Sulhan (2010:13-15), nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari karakter nabi Muhammad yang dapat diterapkan adalah benar, ikhlas, jujur, sabar (sidiq); adil, istikomah, berbakti kepada orang tua, waspada, hormat (amanah), lemah lembut, kebersihan, empati, rendah hati, sopan santun, tanggung jawab (tabligh); disiplin, rajin bekerja, gigih, logis dalam berpikir, ingin berprestasi, kreatif, teliti, dan bekerjasama (fathanah).

Dalam Buku Pedoman Perguruan Tinggi (Kemdiknas 2010), nilai-nilai yang dapat digunakan dalam pendidikan budaya dan karakter ada delapan belas, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.

Menurut Hidayatullah (2010:79-89), butir-butir karakter ada enam puluh sembilan. Keenam puluh sembilan butir-butir tersebut adalah adil, amanah, pengampunan, antisipatif, arif, baik sangka, kebajikan, keberanian, bijaksana, cekatan, cerdas, cerdik, cermat, pendaya guna, demokratis, dermawan, dinamis, disiplin,

efisien, empan papan, empati, fair play, gigih, gotong- royong, hemat, hormat, kehormatan, ikhlas, inisiatif, inovatif, kejujuran, pengendalian diri, kooperatif, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, kemurahan hati, pakewuh, peduli, penuh perhatian, produktif, rajin, ramah, sabar, saleh, santun, setia, sopan, susila, ketaatan, tabah, tangguh, tanggap, tanggung jawab, bertaqwa, tegar, tegas, tekad (komitmen), tekun, tertib, ketertiban, tahu berterima kasih, trengginas, ketulusan, tepat waktu, toleransi, ulet, berwawasan jauh ke depan.

BAB V

PILAR PENDIDIKAN KARAKTER

A. Konsep Habitulasi dan Intervensi

Mengambil analogi dari bangunan sebuah rumah agar kokoh harus ditopang oleh pilar yang kuat. Rumah dengan pilar yang kuat akan tahan dari terpaan angin maupun goncangan gempa sekalipun. Demikian juga pendidikan karakter, secara nasional, hendaknya ditopang oleh pilar yang kuat agar tidak mudah hilang tergerus arus perjalanan sejarah. Apa yang harus menjadi pilar nasional pendidikan karakter? Oleh karena pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional, maka harus dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yaitu: (1) satuan pendidikan (Perguruan Tinggi, perguruan tinggi, satuan/program pendidikan nonformal), (2) keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan (3) masyarakat (komunitas, masyarakat lokal, wilayah, bangsa, dan negara). Hal ini juga konsisten dengan konsep tanggung jawab pendidikan nasional yang berada pada Perguruan Tinggi, keluarga, dan masyarakat.

Indonesia Heritage Foundation merumuskan sembilan pilar karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter.

Kesembilan pilar tersebut meliputi: (cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, (7)keadilan dan kepemimpinan, (8) baik dan rendah hati, dan (9) toleransi, cinta damai dan persatuan.

Sementara *Character Counts* di Amerika mengidentifikasi bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar yaitu: dapat dipercaya (*trustworthiness*), rasa hormat dan perhatian (*respect*), tanggung jawab (*responsibility*), jujur (*fairness*), peduli (*caring*), kewarganegaraan (*citizenship*), ketulusan (*honesty*), berani (*courage*), tekun (*diligence*), dan integritas (Ahmad Tafsir, 2011:43). Selanjutnya Ari Ginanjar dengan teori ESQ menyodorkan pemikiran adanya 7 karakter dasar, yaitu: (1) jujur, (2) tanggung jawab, (3) disiplin, (4) visioner, (5) adil, (6) peduli, dan (7) kerja sama.

Dari berbagai pendapat tentang pilar pendidikan karakter di atas, setiap pilar merupakan suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai (nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis) melalui proses intervensi dan habituasi. Apa yang dimaksud dengan proses intervensi? Intervensi adalah proses pendidikan karakter yang dilakukan secara formal, dikemas dalam interaksi belajar dan pembelajaran (*learning and instruction*) yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter

dengan menerapkan berbagai kegiatan yang terstruktur (*structured learning experiences*).

Proses intervensi dapat dilakukan oleh semua subjek pelajaran namun dengan penekanan yang berbeda. Melalui interaksi belajar dan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama harus melahirkan dua dampak sekaligus, yakni dampak instruksional (*instructional effect*) maupun dampak pengiring (*nurturant effect*), sedangkan interaksi belajar dan pembelajaran bidang lain cukup melahirkan dampak pengiring saja. Di samping itu, dalam interaksi belajar dan pembelajaran tersebut pendidik (guru, dosen, tutor, instruktur) sebagai pendidik yang mencerdaskan dan mendewasakan dan sekaligus harus bertindak sebagai sosok anutan (*role model*).

Habitulasi adalah proses penciptaan aneka situasi dan kondisi (*persistent-life situation*) yang berisi aneka penguatan (*reinforcement*) yang memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan menjadikan perangkat nilai yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi melalui proses olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan karsa itu sebagai karakter atau watak. Sebagai contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan berperilaku jujur. Karena setiap nilai berada dalam spektrum atau

klaster nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosial-kultural suatu nilai harus koheren dengan nilai lain dalam klusternya untuk membentuk karakter yang utuh.

Misalnya, karakter jujur terkait pada nilai jujur, tanggung jawab, dan peduli. Peserta didik yang berperilaku jujur dalam mengerjakan soal ujian, artinya ia peduli terhadap penegakan disiplin dan peningkatan mutu pendidikan karena dengan perilakunya yang jujur tersebut dapat dibangun sportivitas, etos kerja keras, dan kemandirian. Karena itu jika kejujuran sudah tertanam pada sanubari dan ‘merasuk merasukma’ (*personalized*) pada diri peserta didik tidak perlu adanya pengawas ujian dan tidak akan ada pihak yang mencari keuntungan dari jual beli naskah soal ujian maupun upaya membocorkan soal ujian. Sebaliknya jika kejujuran telah sirna adanya pengawas ujian sehebat apapun maupun penjagaan polisi seketat apapun menyontek pada saat ujian dan upaya pembocoran soal sampai kapan pun akan tetap menghiasi saat-saat ujian berlangsung.

B. Hubungan Nilai dengan Pilar Pendidikan Karakter

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/ hukum, etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir nilai yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan serta kebangsaan (Kemendiknas 2010:11-13). Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan adalah religius.

Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri meliputi jujur; tanggung jawab; bergaya hidup sehat; disiplin; kerja keras; percaya diri; berjiwa wirausaha; berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif; mandiri; ingin tahu; dan cinta ilmu. Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama meliputi sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain; patuh pada aturan-aturan sosial; menghargai karya dan prestasi orang lain; santun; demokratis. Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan adalah peduli sosial dan lingkungan. Nilai karakter dalam hubungannya dengan kebangsaan meliputi nasionalis dan menghargai keberagaman.

Nilai-nilai yang akan dikembangkan adalah mandiri, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, kreatif, dan rasa ingin tahu.

1. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Seseorang dikatakan mandiri jika:
 - a. Dalam keadaan dapat berdiri sendiri,
 - b. tidak bergantung pada orang lain
2. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME. Seseorang dikatakan bertanggung jawab jika:
 - a. Melakukan tugas sepenuh hati
 - b. Melaporkan apa yang menjadi tugasnya
 - c. Segala yang menjadi tanggungjannya dapat dijalankan.
 - d. Memahami dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan
 - e. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional dan bermoral
 - f. Kemampuan untuk dipercayai
3. Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Seseorang dikatakan bekerja keras jika:
 - a. Berusaha untuk mencapai tujuan

- b. Berusaha secara sungguh-sungguh
 - c. Mengerjakan tugas sebaik-baiknya
 - d. Tidak mudah putus asa
 - e. Tekun dan semangat
 - f. Segera bangkit dari kegagalan
 - g. Jiwa kuat, tidak kenal menyerah, teguh pendirian, dan tidak mudah goyah.
4. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Seseorang dikatakan disiplin jika:
- a. Tepat waktu, tidak terlambat
 - b. Taat pada peraturan yang berlaku
 - c. Menjalankan tugas sesuai jadwal yang ditentukan
 - d. Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib, dsb yang telah ditetapkan
5. Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Seseorang dikatakan kreatif jika:
- a. Memiliki inovasi
 - b. Memiliki berbagai gagasan untuk menemukan dan menyelesaikan sesuatu
 - c. Suka dengan hal-hal yang baru
 - d. Mendekati sebuah kebutuhan, tugas, atau ide dari suatu perspektif yang baru

- e. Kualitas pemikiran yang orisinal
 - f. Menghasilkan, menyebabkan ada
 - g. Imajinasi, kemampuan untuk membayangkan
6. Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Seseorang dikatakan mempunyai perasaan ingin tahu jika:
- a. Selalu mencari atau memperoleh informasi atau pengetahuan
 - b. Mendalami atau mengkaji pengetahuan yang diperolehnya
 - c. Memperluas pengetahuan yang telah diperolehnya.

Mengambil analogi dari bangunan sebuah rumah agar kokoh harus ditopang oleh pilar yang kuat. Rumah dengan pilar yang kuat akan tahan dari terpaan angin maupun guncangan gempa sekalipun. Demikianlah pendidikan karakter, secara nasional, hendaknya ditopang oleh pilar yang kuat agar tidak mudah hilang tergerus arus perjalanan sejarah. Apa yang harus menjadi pilar nasional pendidikan karakter? Oleh karena pendidikan karakter sebagai bagian integral dari keseluruhan tatanan sistem pendidikan nasional, maka harus dikembangkan dan dilaksanakan secara sistemik dan holistik dalam tiga pilar nasional pendidikan karakter, yakni satuan pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, satuan/ program pendidikan nonformal),

keluarga (keluarga inti, keluarga luas, keluarga orang tua tunggal), dan masyarakat juga konsisten dengan konsep tanggung jawab pendidikan nasional yang berada pada perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat. Setiap pilar merupakan suatu entitas pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai (nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis) melalui proses intervensi dan habituasi.

Sebaliknya jika kejujuran telah sirna adanya pengawas ujian sehebat apapun penjagaan polisi seketat apapun menyontek pada saat ujian dan upaya pembocoran soal sampai kapan pun akan tetap menghiasi saat-saat ujian berlangsung. Ketiga pilar tersebut digambarkan sebagai berikut :

<i>PILAR SATUAN PENDIDIKAN</i>		
NILAI-NILAI LUHUR	INTERVENSI	HABITUASI
<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, bertanggung jawab 	<p>Tujuan : Terbentuknya karakter peserta didik melalui kegiatan Perguruan Tinggi</p>	<p>Tujuan : Terbiasanya perilaku yang berkarakter di Perguruan Tinggi</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Cerdas • Sehat dan bersih 	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi terhadap siswa • Intra dan kokurikuler secara terintegrasi pada semua mata 	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keteladanan KS, Pendidik, tenaga kependidikan • Budaya Perguruan Tinggi yang

<ul style="list-style-type: none"> • Peduli dan Kreatif 	<p>pelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstrakurikuler melalui berbagai kegiatan antara lain : KIR, pramuka, kesenian, olahraga, dokter keil, PMR • Budaya Perguruan Tinggi dengan menciptakan suasana Perguruan Tinggi yang mencerminkan karakter • Pemerintah terhadap Perguruan Tinggi • Kebijakan • Pedoman • Penguatan • Penguatan • Pelatihan 	<p>bersih, sehat, tertib, disiplin, dan indah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggalakan kembali berbagai tradisi yang membangun karakter seperti : hari krida, upacara, piket kelas, ibadah bersama, doa (perenungan), hormat guru, hormat bendera, program 5 S, cerita kepahlawanan.
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Buku penghubung • Pelibatan orang tua dalam kegiatan Perguruan Tinggi <p><i>Pemerintah terhadap keluarga :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemerintah untuk keluarga 	
--	--	--

Tabel 9. Pilar Keluarga dalam Pendidikan Karakter

Sumber : Grand Desain Pendidikan Karakter 2010

PILAR MASYARAKAT

NILAI-NILAI LUHUR	INTERVENSI	HABITUASI
<ul style="list-style-type: none"> • Jujur, bertanggung jawab • Cerdas • Sehat dan Bersih 	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbangunya kerangka sistematis perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pendidikan karakter nasional <p>Strategi:</p> <p>Pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan grand design pendidikan karakter • Pencanaan nasional pendidikan karakter 	<p>Tujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terciptanya suasana yang kondusif dalam masyarakat yang mencerminkan koherensi pembangunan karakter secara nasional. • Tumbuhnya keteladanan dalam masyarakat

<ul style="list-style-type: none"> • Peduli dan Kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan perangkat pendukung pendidikan karakter, al: iklan layanan masyarakat, sajian multimedia (poster, siaran tv, siaran radio) <p>Dalam pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peranan komite Perguruan Tinggi dalam pembangunan karakter melalui MBS • Perintisan berbagai kegiatan kemasyarakatan, pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peserta didik • Pelibatan semua komponen bangsa dalam pendidikan karakter, al : media massa 	<p>Strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keteladanan dan penguatan dalam kehidupan masyarakat
--	--	--

Tabel 10. Pilar Masyarakat dalam pendidikan karakter

Sumber : Grand Desain Pendidikan Karakter 2010.

BAB VI

STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam proses pendidikan, yang mampu menggali seluruh potensi individu secara cerdas dan efektif demi terbentuknya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Untuk itu, diperlukan pembaruan/ reformasi konsep dan paradigma pembelajaran PKn dari yang hanya menekankan pada aspek kognitif menjadi penekanan pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious serta memiliki karakteristik yang multi dimensional, perlu dilihat dalam tiga aspek antara lain: **Pertama**, PKn sebagai suatu kajian mengenai “*civic virtue*” dan “*civic culture*” yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan.

Kedua, PKn sebagai program kurikuler memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religious baik dalam latar pendidikan di Perguruan Tinggi maupun di luar Perguruan Tinggi, yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta bermanfaat yang

sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. **Ketiga**, PKn sebagai gerakan sosial budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*civic virtue*” dan “*civic culture*” melalui partisipatif aktif secara cerdas, demokratis, dan religious dalam lingkungannya. (Winataputra,1999:23).

Pembaharuan itu diharapkan dapat menjadikan peserta didik sebagai young citizen atau warga negara yang cerdas, kreatif, partisipati, prospektif, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan masukan terhadap kebijakan publik dilingkungannya. Dalam hal ini, Budimansyah (2008:182) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri bermakna (*meaningful*) teritegarasi (*integrated*) berbasis nilai (*value based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Dari pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa selama ini proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan aspek kognitif dibandingkan dengan aspek afektif. Seharusnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Jauhnya perilaku siswa dari isi pesan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Wahab (1999:2) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di Perguruan Tinggi.

Bahkan dalam kasus yang lebih besar, yakni berbagai krisis yang dialami Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral nampaknya bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu.

Untuk itu diperlukan pembenahan terhadap internalisasi nilai, dan karakter seseorang. Istilah karakter biasa digunakan untuk merujuk dimensi moral seseorang. Salah satu contoh adalah ilmuwan Aristoteles yang sering menggunakan istilah *ēthē* untuk karakter yang secara etimologis berkaitan dengan “*ethics*” dan “*morality*”. Adapun ahli psikologi pun banyak yang mengajukan definisi karakter dari berbagai pendekatan. Ada yang menggunakan istilah karakter pada area moral saja, ada juga yang memakainya pada domain moral dan nonmoral. Menurut Hasting et al. (2007), karakter mempunyai domain moral dan nonmoral.

Karakter berdomain moral ialah semua perilaku yang merujuk kepada hubungan interpersonal atau hubungan dengan orang lain. Contohnya, kasih sayang, empati, loyal, membantu dan peduli dengan orang lain (sifat-sifat feminis). Sedangkan karakter berdomain nonmoral adalah semua perilaku yang merujuk kepada pengembangan sifat-sifat dalam diri atau intrapersonal. Contohnya, disiplin, jujur, bertanggung jawab, pantang menyerah dan percaya diri (sifat-sifat maskulin). Baik karakter berdomain moral maupun nonmoral tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk membentuk kepribadian yang peka terhadap kepentingan sosial (prososial).

Sedangkan apabila dilihat pada aspek pendidikan nilai, maka pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks dari pada dimensi teoritisnya karena terkait dengan konteks sosio-kultur dimana pendidikan nilai itu dilaksanakan. Karakter yang baik (*good character*) mengandung tiga dimensi nilai moral: 1. Dimensi wawasan moral (*knowing moral values*) a. Kemampuan mengambil pandangan orang lain (*perspective taking*) b. Penalaran moral (*moral reasoning*) c. Mengambil keputusan (*decision-making*) d. Pemahaman diri sendiri (*self-knowledge*) 2. Dimensi perasaan moral (*moral feeling*) a. Kata hati/ nurani (*conscience*) b. Harapan diri sendiri (*self-esteem*) c. Merasakan diri orang lain (*empathy*) d. Cinta kebaikan (*loving the good*) e. Kontrol diri (*self-control*) f. Merasakan diri sendiri (*humility*) 3. Dimensi perilaku moral a. Kompetensi (*competence*) b. Kemauan (*will*) c. Kebiasaan (*habit*).

Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di Perguruan Tinggi harus dilihat dalam paradigma pendidikan nilai secara konseptual dan operasional. Konsep-konsep “*values education, moral education, education for virtues*” yang secara teoritik, oleh Lickona (1992) diperkenalkan sebagai program dan proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran, atau menurut Bloom untuk mengembangkan nilai dan sikap. Lebih jauh juga Lickona (1992:6-7) melihat bahwa para pemikir dan pembangun

demokrasi, sebagai paradigma kehidupan di dunia barat, berpandangan bahwa pendidikan moral merupakan aspek yang esensial bagi perkembangan dan berhasilnya kehidupan demokrasi. Setiap individu warganegara seyogyanya mengerti dan memiliki komitmen terhadap fondasi moral demokrasi yakni menghormati hak orang lain, mematuhi hukum yang berlaku, berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, dan peduli terhadap perlunya kebaikan umum.

Selanjutnya menurut Thomas Lickona (2012: 48) Tripologi pendekatan pendidikan karakter dapat dikembangkan sebagai berikut:



Gambar 13 : Lima Tripologi Pendekatan Pendidikan Karakter

Uraian lebih lanjut dalam pembahasan ini akan didasarkan pada lima pendekatan tersebut. Kelima pendekatan ini, selain telah dikaji dan dirumuskan tipologinya dengan jelas oleh Superka, juga dipandang sesuai dan bermanfaat dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan sebagai berikut. Piaget membagi beberapa tahapan dalam dua domain yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Tahapan domain kesadaran mengenai aturan: 1. usia 0-2 tahun: pada usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak bersifat memaksa. 2. Usia 2-8 tahun: pada usia ini aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran. 3. usia 8-12 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan tahapan pada domain pelaksanaan aturan: 1. usia 0-2 tahun: pada usia ini aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. 2. usia 2-6 tahun: pada usia ini aturan dilakukan sebagai perilaku yang lebih berorientasi diri sendiri. 3. usia 6-10 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. 4. usia 10-12 tahun: pada usia ini aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Dari penelitian Kohlberg merumuskan adanya tiga tingkat yang didasari atas enam tahap perkembangan moral sebagai berikut: 1. Tingkat I: Prakonvensional (*Preconventional*) a. Tahap I: Orientasi hukumman dan kepatuhan. Ciri moralita pada

tahap ini adalah apapun yang pada akhirnya mendapat pujian atau dihormati adalah baik, dan adapun yang pada akhirnya dikenai hukuman adalah buruk. b. Tahap 2: Orientasi instrumental nisbi. Ciri moralita pada tahap ini adalah seseorang berbuat baik apabila orang lain berbuat baik padanya, dan baik itu adalah sesuatu bila satu sama lain berbuat hal yang sama. 2. Tingkat II: Konvensional (*Conventional*) a. Tahap 3: Orientasi umpan balik. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang dipandang baik dengan pertimbangan untuk memenuhi tanggapan orang lain baik atau baik karena memang disepakati. b. Tahap 4: Orientasi hukum dan ketertiban. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu hal yang baik itu adalah yang diatur oleh hukum dalam masyarakat dan dikerjakan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai dengan norma hukum tersebut. 3. tingkat III: Poskonvensional (*Postconventional*) a. tahap 5: Orientasi kontrak sosial legalistik. Ciri utama moralita adalah bahwa sesuatu dinilai baik bila sesuai dengan kesepakatan umum dan diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran konsensual. b. Tahap 6: Orientasi prinsip etika universal. Ciri utama moralita pada tahap ini adalah bahwa sesuatu dianggap baik bila telah menjadi prinsip etika yang bersifat universal dari mana norma dan aturan dijabarkan.

Terkait dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada Kurikulum 2013, pemunculan kembali

nomenklatur ini merupakan reaksi terhadap kondisi kebangsaan yang makin tidak menentu sehubungan dengan perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara yang terasa jauh dari nilai-nilai Pancasila. Melalui program Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, pemerintah berupaya membenahi keterpurukan bangsa ini. Maka dari itu dalam proses pembelajaran harus dirancang suatu model pembelajaran dimana siswa harus mampu mengembangkan seluruh potensinya agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, demokratis dan bertanggung jawab, sehingga perlu dikembangkan suatu proses pembelajaran yang humanistik dimana suasana belajar mengajar bersifat kekeluargaan, hangat dan terbuka.

Pakar pendidikan sudah banyak membahas dan merumuskan tentang model-model pembelajaran PKn, Djahiri (2003: 9-22) mengajukan tiga macam yaitu “Pembelajaran AJEL (Active, Joyful, Efektif, Learning), pembelajaran M3SE (Multidimensi, Materi-media-sumber-evaluasi), dan pembelajaran portofolio. Ketiga jenis pembelajaran tersebut sangat cocok untuk diterapkan pada pembelajaran PKn sebagai pola pembelajaran yang melibatkan fisik, emosi, dan sosial yang positif dengan didorong oleh lingkungan yang kondusif, menyenangkan dan mendorong semangat belajar sehingga memenuhi ciri-ciri belajar yang diharapkan yaitu holistik

(pembelajaran dikaji dari beberapa bidang dan fenomena), bermakna (keterkaitan antara teori dan praktek sebagai perolehan nyata hasil belajar), dan aktif (siswa dalam terlibat dalam proses pembelajaran).

Project citizen adalah sebuah model pembelajaran berbasis potofolio. Melalui model ini para siswa bukan hanya diajak untuk memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga mengembangkan kemampuannya untuk bekerja secara kooperatif melalui kegiatan belajar praktik-empirik. dengan demikian pembelajaran akan semakin menantang, mengaktifkan dan lebih bermakna.

Menurut Winataputra dan Budimansyah (2007: 254) menyatakan bahwa

“Secara pedagogis model pembelajaran *Project Citizen* dirancang untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, langkah-langkah dan metode yang digunakan di dalam proses politik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan komitmen peserta didik terhadap kewarganegaraan dan pemerintahan dengan cara memfasili peserta didik untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dan bermakna, memberikan pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang demokratis, mengembangkan pemahaman tentang pentingnya partisipasi warga Negara secara demokratis.”

Misi model ini adalah mendidik peserta didik agar mampu menganalisis berbagai dimensi kebijakan publik, dan kemudian dengan kapasitasnya sebagai “*young citizen*” atau warga negara muda yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif dan bertanggung jawab, agar member masukan terhadap kebijakan di lingkungannya.

Agar model pembelajaran *Project Citizen* dapat menjadi bagian dari pengembangan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi, maka peneliti mengembangkan model pembelajaran *Project Citizen* menjadi *Characther Project Citizen (CPC)* dengan harapan model tersebut dapat dikembangkan sejalan dengan pencapaian tujuan pembelajaran PKn secara menyeluruh dan sekaligus dapat memperkuat nilai moral sebagai pilar pendidikan karakter.

Karakter berkaitan dengan konsep moral (*moral knowwing*), sikap moral (*moral felling*), dan perilaku moral (*moral behavior*). Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Beberapa keterampilan yang diperlukan agar seseorang dapat mengamalkan nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat. Keterampilan tersebut antara lain: Keterampilan berpikir kritis, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mencari kejelasan pernyataan

atau pertanyaan; (2) mencari alasan; (3) mencoba memperoleh informasi yang benar; (4) menggunakan sumber yang dapat dipercaya; (5) mempertimbangkan keseluruhan situasi; (6) mencari alternatif; (7) bersikap terbuka. Selanjutnya Keterampilan mengatasi masalah. Masih banyak orang mengatasi konflik dengan kekuatan fisik, padahal cara demikian itu biasa digunakan oleh binatang. Manusia yang menggunakan nilai religius dan prinsip moral dalam penyelesaian masalah kehidupan, perlu diajarkan cara mengatasinya yang konstruktif. Seluruh keterampilan tersebut merupakan bagian dari pencapaian tujuan pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013.

Character Project Citizen, dapat membantu peserta didik untuk lebih meningkatkan karakteristik berpikir kritis, yang memiliki tanggungjawab secara moral, dan diarahkan akan dikembangkan berpikir kritis yang mampu menyikapi persoalan permasalahan bangsa dan negara dengan *civic knowledge, civic value, civic responsibility, civic disposition* yang dimiliki peserta didik sebagai seorang warga negara yang sejalan dengan kurikulum 2013 dengan menghasilkan produk pengembangan berupa perangkat pembelajaran, dan buku panduan model pembelajaran CPC yang dilengkapi dengan buku guru dan buku siswa.

KISI – KISI EVALUASI

PENDIDIKAN KARAKTER

Kompetensi	Indikator	Penilaian	Keterangan
Kemampuan untuk memahami Persoalan dan Konsep Karakter	Mahasiswa mampu memahami Persoalan dan Konsep Karakter	1. Tes a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi	Uraian
Kemampuan untuk menganalisis Konsep Dasar Pendidikan Karakter	Menganalisis Konsep Dasar Pendidikan Karakter	1. Tes a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes	Unjuk Kerja dan Lembar Pengamatan
Kemampuan untuk menganalisis Kebijakan Pendidikan Karakter	Menganalisis Kebijakan Pendidikan Karakter	1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi	
Kemampuan untuk menerapkan Model Pendidikan Karakter	Menerapkan Model Pendidikan Karakter		Unjuk Kerja dan Lembar Pengamatan

Kemampuan untuk menggali sumber nilai Pendidikan Karakter	Menggali sumber nilai Pendidikan Karakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan untuk memahami budaya dan Karakter Bangsa	Memahami budaya dan Karakter Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan untuk menerapkan Komponen Karakter yang baik	Menerapkan Komponen Karakter yang baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes <ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan untuk memahami Pembudayaan Karakter	Memahami Pembudayaan Karakter Bangsa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tes <ol style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 	

Bangsa		<ul style="list-style-type: none"> 2. Non Tes 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan Untuk Menyelesaikan Tantangan Pembangunan Karakter Bangsa	Menyelesaikan Tantangan Pembangunan Karakter Bangsa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tes <ul style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan Berperan Aktif Menggali Karakter yang dibutuhkan Bangsa Indonesia	Menggali Karakter yang dibutuhkan Bangsa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tes <ul style="list-style-type: none"> a. Ujian tengah semester b. Ujian akhir semester 2. Non Tes 1. Tugas 2. Makalah 3. Resume 4. Resensi 	
Kemampuan Berperan Aktif Menggali Karakter dan Kemajuan Bangsa	Menggali Karakter dan Kemajuan Bangsa	Project Citizen	

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Suprijono, (2009). *Cooperatitive Learning (Teori dan Aplikasi Paikem)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anderson,D, (1992). *The loss of Virtue: Moral confusion and Disorder in Britain and American* ,Teachers colleges: Newyork
- Anderson, L.W. dan Krathwohl, (2001). *A taxonomy for learning teaching and assesing*, Longman: Newyork
- Arthur,J. (2005). *Education with Character: The Moral Economy of schooling*: London
- Aslan, Mecit, (2011). *Handbook of Moral and Character Education. International Journal of Instruction*, July 2011 Vol 4, No. 2
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- _____, (2009). *Inovasi Pembelajaran Project Citizen*, Bandung: Program Studi PKn SPS UPI.
- Center for Indonesian Civic Education. (1999). *Democratic Citizen in a Civil Society: Report of the Conference on Civic Education for Civil Society*, Bandung:CICED
- Endah Sulistyowati, (2012). *Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter* . Citra Aji Parama : Yogyakarta
- Daroeso, Bambang, (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu
- Dimerman, S, (2009). *Character Is The Key (How To Unlock The Best in Our Children and Ourselves)*. John Wiley & Sons: Canada

- Donie Koesuma, (2007). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik di Zaman Global*. Grasindo: Jakarta
- _____, (2010). *Pendidikan Karakter*. Grasindo: Jakarta
- Fatchul Mu'in, (2011). *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoritik dan Praktik*. Ar- Ruz Media: Jogjakarta
- Fraenkel, J.R. and Wallen, N.E. (1993). *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw Hill Inc
- Furqon Hidayatullah, M. (2011). *Guru Sejati: Membangun berkarakter kuat dan cerdas*. , Yuma Pustaka: Surakarta
- Gerhard Himmelman, (2013). *Competences for Teaching, Learning and Living Democratic Citizenship*. dalam Murray Print dan Dirk Lange (eds.), *Civic Education and Competences for Engaging Citizens in Democracies*. Rotterdam: Sense Publishers.
- Irwan, (2010). *Landasan Membangun Karakter Bangsa*. Artikel pendidikan, Januari 2010
- Kemendiknas, (2010). *Kebijakan Pendidikan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kemendiknas
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). *Materi Sosialisasi Kurikulum 2013 untuk Asesor Sertifikasi Guru*, di Rayon 111 Universitas Negeri Yogyakarta, Juli 2013.
- Kirschenbaum, H. (1998). *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Allyn and Bawn : Boston
- Kohlberg, Lawrence, (1977). *Tahap – Tahap Perkembangan Moral*, Yogyakarta: Kanisius
- Larry P.N, Darcia Narvaez, (2014). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter (Handbook of Moral and Character Education)*. Bandung: Nusa Media

- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Simon & Schuster, Inc
- _____. (2004). *Character Matters: How to Help Our Children Develop*
- Mayer, RE, (2008). *Leraning and Instruction* . New Jersey: Pearson
- Megawangi, Ratna, (2004). *Pengembangan Program Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi: Pengalaman Perguruan Tinggi*,[http. pendidikan.com/Pilar pendidikan Karakter/](http://pendidikan.com/Pilar_pendidikan_Karakter/) diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Mohamad Mustari, (2011). *Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Muhammad Rohman, (2012). *Kurikulum Berkarakter, Jakarta: Prestasi Pustaka*
- Ramli, (2003). *Menguak Karakter Bangsa*, Grasindo: Jakarta
- Salam, Burhanudin, (2000). *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sarbaini, (2011). *Model Pembelajaran Berbasis Kognitif Moral dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Simon, (1972). *Values Clarification (A Handbook of Practical Strategies For Teachers and Students)*. Hart Publish Company: Newyork
- Suyanto, (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter/* artikel pendidikan/ maret 2010
- Spord, (2004). *Philosophical Discussion in Moral Education (The Community of Ethical Inquiry)* . Routledge: London
- Tillman, D, (2001). *Living Values Activities for Children 8 - 14* (Editor Respati,dkk). Jakarta: PT Grasindo

Winataputra, Udin S.(2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka

Zaim Elmubarak, (2008). *Membumikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta : Bandung

Sumber Internet:

Auliana. (2008). *Komponen-Komponen Pengembangan Kurikulum*. [Online].

Tersedia:http://lavender2night.multiply.com/journal/item/5?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Di akses pada tanggal 17 Februari 2014.

Hasanah, Aan. (2009). *Pendidikan Berbasis Karakter*. Diakses pada 10 Juni 2010, dari:<http://www.mediaindonesia.com/cetak/2009/12/14/111318/68/11/Pendidikan-Berbasis-Karakter.html>. Di akses pada tanggal 10 Februari 2014

Sudrajat, Akhmad. (2008). *Komponen-Komponen Kurikulum*. [Online]. Tersedia: <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/22/komponen-komponen-kurikulum/>. Di akses pada tanggal 17 Februari 2014.

Wahyudin. (2011). *Komponen-Komponen Kurikulum dan Pengembangan Silabus Pendidikan Agama Islam*. [Online]. Tersedia: <http://whyfaqoth.blogspot.com/2011/07/komponen-komponen-kurikulum-dan.html>. Di akses pada tanggal 17 Februari 2014.

Sumber Peraturan Perundang – undangan:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Perguruan Tinggi Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Perguruan Tinggi Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Perguruan Tinggi Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Perguruan Tinggi Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

SINOPSIS PENULIS



Dr. Anita Trisiana, S.Pd.,M.H.

Anita Trisiana, lahir pada tanggal 22 April 1980, di Tegal, lulusan S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (UNS), S2 Ilmu Hukum (UNS), dan lulus S3 Doktor Ilmu Pendidikan (UNS). Dosen PPKn, FKIP pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta ini aktif dalam kegiatan penelitian dan publikasi, dan telah menghasilkan karya inovatif yang dihasilkan dari hasil penelitian. Bidang Ilmu yang dikembangkan pada Pendidikan Kewarganegaraan, dikembangkan pula untuk Pendidikan Karakter pada setiap *road map* kegiatan penelitian yang dilakukan, seperti Model pembelajaran, Media pembelajaran, dan juga aktif dalam mengembangkan kreativitas ilmiah untuk mahasiswa.



Dr. Sugiaryo, S.H., M.Pd., M.H.

Sugiaryo, lahir pada tanggal 11 Januari 1963, di Boyolali. Riwayat pendidikan S1 PPKn tahun 1986; S1 Fakultas Hukum tahun 1996; S2 Pendidikan Sejarah 2001; S2 Ilmu Hukum tahun 2010; dan S3 Ilmu Hukum tahun 2016. Saat ini menjadi Dosen PPKn, FKIP pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan aktif sebagai Ketua PGRI Kota Surakarta 2009 – sekarang, untuk aktif menyuarakan aspirasi dan perjuangan bagi para guru demi terwujudnya generasi yang cerdas.



Dr. Rispanyo, M.Si.

Rispanyo, lahir pada tanggal 28 April 1966, di Karanganyar. Telah selesai studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP; S2 Akuntansi (UGM), dan S3 Akuntansi (UNS). Sekarang sebagai Dosen Fakultas Ekonomi, pada Universitas Slamet Riyadi Surakarta, dan menduduki jabatan sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik. Mata kuliah yang diajarkan antara lain Akuntansi Keperilakuan; Akuntansi Pemeriksaan/Auditing; Analisis Laporan Keuangan; Akuntansi Manajemen.